



REVIEW PENGANGGARAN DAN PENGALOKASIAN DANA INSENTIF DAERAH TAHUN 2021 DAN USULAN PERBAIKANNYA UNTUK TAHUN 2022



REVIEW PENGANGGARAN DAN PENGALOKASIAN DANA INSENTIF DAERAH TAHUN 2021 DAN USULAN PERBAIKANNYA UNTUK TAHUN 2022

Penulis

Nurkholis, M.S.E.

KOMPAK

Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan
Kemitraan Pemerintah Australia - Indonesia

Kajian Peningkatan Pelayanan Kesehatan Berkualitas Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Di Provinsi Papua Dan Papua Barat

ISBN: 978-623-6080-43-6

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

©2022 Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK)

Pengarah:

Adriyanto, Direktur Dana Transfer Umum, DJPK,
Kementerian Keuangan

Penulis:

Nurkholis, M.S.E.

Kontributor:

Ardimansyah
Helmy Rukmana
Ilham Budiarto
Nanang Garendra Timur
Nurdianto Setiawan
Mahartha Titi
Reiza Aulia Runtika
Rian Kelana Ednur
Rino Rio Kent

Kontributor dan Penyunting:

Devi Suryani
Heracles Lang

Publikasi ini adalah produk pengetahuan dari tim penyusun yang namanya tertulis pada buku ini. Temuan, interpretasi, dan ringkasan yang dinyatakan atau disampaikan adalah pandangan pribadi penyusun dan tidak mencerminkan pandangan KOMPAK, Pemerintah Indonesia, Pemerintah Australia, atau lembaga lain yang terlibat dalam penyusunan publikasi ini.

Temuan/kutipan/data/ringkasan sebagaimana dimaksud dalam publikasi ini diperoleh dari berbagai sumber yang dianggap dapat diandalkan. Namun demikian, KOMPAK tidak menjamin dan/atau mewakili, baik tersurat maupun tersirat, mengenai akurasi, kecukupan, keandalan atau kewajaran informasi tersebut dan pendapat yang terkandung dalam publikasi ini.

Publikasi ini didukung oleh Pemerintah Australia melalui Program KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan). Publikasi ini silakan disalin dan disebarakan untuk tujuan nonkomersial.

Untuk keterangan lebih lanjut mengenai publikasi ini, dapat menghubungi communication@kompak.or.id. Publikasi juga tersedia di www.kompak.or.id

Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) Program kemitraan Pemerintah Australia-Indonesia

Jalan Diponegoro No. 72
Jakarta Pusat, 10320
Telepon (021) 8067 5000 | Faksimili (021) 3190 3090

Bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

KATA PENGANTAR

Dana Insentif Daerah (DID) merupakan salah satu bentuk *performance-based grant system* (PBGs) yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia yang diterapkan sejak tahun 2010. Dana Insentif Daerah (DID) merupakan bagian dari dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat. Besaran alokasi DID terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, dimana pada tahun 2010 anggarannya sebesar Rp. 1,2 triliun dan pada tahun 2021 telah mencapai Rp.13,5 triliun.

Kajian tentang *review* penganggaran dan pengalokasian DID tahun 2021 dan usulan perbaikannya untuk DID tahun 2022 ini disusun untuk mengetahui perkembangan dan dinamika kebijakan DID dari waktu ke waktu khususnya DID tahun 2021 ke 2022, sehingga dapat terdokumentasikan dengan baik terkait dengan latar belakang, alasan, tujuan dan proses dari dilakukannya perbaikan dan penyempurnaan kebijakan penganggaran dan pengalokasian DID ke depan, baik terkait dengan indikasi kebutuhan dana TKDD untuk DID, indikator kriteria utama, indikator kriteria kinerja, dan berbagai hal lainnya yang terkait.

Program Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) secara rutin tiap tahun sejak tahun 2016 bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan untuk melakukan *review* terkait penganggaran dan pengalokasian DID tahun sebelumnya dan menyusun usulan perbaikan untuk tahun berikutnya. Hal tersebut tentunya selaras dengan Program KOMPAK yang merupakan program kerjasama Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia, yang salah satunya ditujukan untuk mendukung peningkatan pelayanan dasar, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan.

Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan laporan kajian ini, khususnya Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan juga berbagai Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kami berharap laporan kajian ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan kebijakan terkait dengan perbaikan kebijakan pengalokasian Dana Insentif Daerah untuk Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota ke depan.

Anna Winoto
Tim Leader KOMPAK

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kebijakan pengelolaan Dana Insentif Daerah (DID) untuk Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota selama ini diatur dalam Undang-Undang tentang APBN (tiap tahun), Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Presiden tentang Rincian APBN (tiap tahun), dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Untuk DID tahun 2021, PMK yang mengatur terkait pengelolaan DID adalah PMK No. 167/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas PMK No. 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah. Dalam penganggaran dan pengalokasian DID, terdapat beberapa hal yang diatur, khususnya dalam No. 141/PMK.07/2019, antara lain berupa indikasi kebutuhan Dana TKDD untuk DID, penyediaan data DID, dan penghitungan dan penetapan alokasi DID untuk DID tahun depannya.

Penganggaran dan pengalokasian DID untuk tahun 2021 telah dilakukan dan diumumkan oleh Pemerintah lebih maju dari tahun sebelumnya, dimana untuk tahun 2021 diumumkan pada akhir bulan September 2020 (sebelumnya pada akhir Oktober 2019), dengan total alokasi sebesar Rp. 13.5 triliun, yang didistribusikan kepada 426 Pemerintah Daerah (312 kabupaten, 84 kota dan 30 provinsi) yang berhak menerima sesuai dengan capaian pemenuhan kriteria utama dan kategori kinerja. Besaran alokasi DID tahun 2020 yang ditetapkan sebesar Rp. 13,5 triliun tersebut tertuang dalam UU Nomor 9 Tahun 2020 tentang APBN Tahun 2021 dan terinci dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 untuk setiap daerah penerimanya (provinsi dan kabupaten/kota).

Tujuan dari penyusunan kajian tentang *Review* Penganggaran dan Pengalokasian DID Tahun 2021 dan Usulan Perbaikannya untuk Tahun 2022 ini adalah untuk: (a) Memperkirakan besaran penganggaran terkait dengan nilai indikasi kebutuhan Dana TKDD untuk DID tahun 2022 ke depan; (b) *Me-review* penghitungan alokasi DID tahun 2021, baik untuk kriteria utama maupun kriteria kinerja; dan (c) Menyusun saran/rekomendasi terkait penganggaran dan penghitungan alokasi DID tahun 2022 ke depan.

Indikasi kebutuhan dana TKDD untuk DID pada tahun 2022 sebaiknya tidak menurun, minimal dapat dipertahankan dan bahkan sebaiknya dapat ditingkatkan dari tahun sebelumnya (tahun 2021). Dari hasil proyeksi, dana TKDD untuk DID pada tahun 2021 dapat ditingkatkan menjadi minimal menjadi Rp. 16,4 triliun (meningkat minimal 21,34

persen dari tahun 2021). Hal tersebut tentunya dengan asumsi bahwa wabah pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia telah mulai mereda dan kondisi keuangan negara sudah membaik dan stabil;

Kriteria utama yang perlu dipertahankan ke depan untuk pengalokasian DID tahun 2022 adalah: (i) Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); (ii) Penetapan Peraturan Daerah mengenai APBD tepat waktu; dan (iii) Pelaksanaan e-government (*e-procurement* dan *e-budgeting*). Indikator ketersediaan PTSP sebaiknya dihilangkan saja.

Dalam penetapan dan penghitungan alokasi DID, sebaiknya tetap menggunakan kluster seperti DID tahun-tahun sebelumnya (khususnya DID untuk tahun 2021), yaitu tetap menurut jenis pemerintahan daerahnya yang berjumlah 3 kluster, yakni provinsi, kabupaten, dan kota. Dari semua kelompok kategori, koefisien korelasi daerah penerima DID antara tahun 2020 dan 2021 cukup rendah (baik). Terdapat satu kategori yang juga perlu mendapatkan perhatian karena memiliki koefisien korelasi yang agak tinggi (lebih besar dari 0,5), yaitu untuk kategori Inovasi Daerah. Koefisien korelasi yang agak tinggi tersebut menunjukkan bahwa daerah yang telah mendapatkan alokasi pada kinerja tersebut pada tahun 2020, memiliki peluang yang besar untuk mendapatkan alokasi kembali pada kategori yang bersangkutan pada tahun 2021.

Data yang relatif kurang *up to date* dalam penghitungan DID umumnya adalah data-data yang terkait kategori kinerja pelayanan dasar publik dan kategori kesejahteraan masyarakat yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Mengingat sumber data yang dilakukan melalui Susenas (yang dilakukan 2 kali dalam setahun, yaitu Bulan Maret dan September), dan juga waktu penetapan dan penghitungan alokasi DID yang baru diumumkan paling cepat akhir Oktober pada tahun yang bersangkutan, sebenarnya terdapat potensi untuk menggunakan data yang lebih *up to date*. Tentunya hal ini perlu dikomunikasikan dengan BPS sebagai penyedia data terkait kategori kinerja pelayanan dasar publik dan kategori kinerja kesejahteraan masyarakat.

Terkait dengan indikator-indikator kinerja yang penilaiannya menggunakan kombinasi capaian tahun terakhir dan nilai perubahannya (delta) dari tahun sebelumnya, sebaiknya ke depan nilai perubahannya (delta) mendapatkan bobot yang lebih tinggi dibandingkan dengan bobot pencapaian nilai terakhir. Indikator dan target kegiatan prioritas dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dapat dijadikan sebagai dasar dalam penambahan, pengurangan atau perbaikan terhadap indikator dalam berbagai kategori kinerja yang digunakan dalam penghitungan alokasi DID ke depan.

Untuk kategori kinerja dalam DID tahun 2022, usulan perubahan indikator kinerjanya antara lain:

- ☑ Kemandirian keuangan daerah sebaiknya menggunakan indikator rasio Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PDRB Non-Migas (hanya Lapangan Usaha yang Sekunder dan Tersier saja, tidak termasuk yang primer)
- ☑ Menghilangkan indikator efektifitas pengelolaan belanja daerah yaitu terkait belanja modal Pendidikan dan belanja Kesehatan non kantor terhadap realisasi belanja masing-masing bidang, karena relatif tidak mencerminkan kualitas pengelolaan belanja daerah;
- ☑ Menghilangkan indikator penanganan *stunting* balita bila datanya tidak tersedia dan kurang valid dan akurat;
- ☑ Menghilangkan indikator peningkatan investasi dan ekspor bila datanya tidak tersedia cukup update;
- ☑ Mengganti indikator Pengelolaan Sampah bila datanya tidak tersedia cukup *update*, yaitu dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dari KLHK; dan
- ☑ Pada kelompok kategori pelayanan dasar publik bidang infrastruktur, sebaiknya ditambahkan dengan kategori proporsi rumah tangga yang menempati hunian layak (rumah layak huni);
- ☑ Perlunya penambahan indikator Kinerja Pelayanan PTSP yang dilakukan penilaiannya oleh Kementerian Investasi/BKPM, dan menggantikan indikator peningkatan investasi yang datanya relatif kurang *up-to-date*.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR SINGKATAN	xi
A. PENDAHULUAN	1
B. TUJUAN	6
C. INDIKASI KEBUTUHAN DANA TKDD UNTUK DID TAHUN 2022	7
D. REVIEW PENGHITUNGAN ALOKASI DID TAHUN 2021 DAN USULAN PERBAIKAN UNTUK DID TAHUN 2022	15
D.1 Kriteria Utama	15
D.2 Kategori Kinerja.....	21
E. SARAN/REKOMENDASI	55
F. DAFTAR PUSTAKA	59

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Penambahan Indikator/Variabel DID Tahun 2021	3
Tabel 1.2 Indikator yang Tidak Digunakan Lagi pada DID Tahun 2021.....	3
Tabel 1.3 Kategori Kinerja dalam Penghitungan Alokasi DID Tahun 2021	4
Tabel 1.4 Indikasi Kebutuhan Dana TKDD untuk DID Tahun 2021.....	9
Tabel 1.5 Perkembangan Jumlah Daerah yang Memenuhi Kriteria Utama (<i>Eligible</i>) dan Daerah Penerima DID Tahun 2017-2021	16
Tabel 1.6 Perkembangan Jumlah Daerah yang Memenuhi Kriteria Utama DID Tahun 2017-2021	17
Tabel 1.7 Perkembangan Opini BPK WTP Atas LKPD untuk DID Tahun 2017-2020 dan Proyeksinya untuk DID Tahun 2021-2023.....	18
Tabel 1.8 Perkembangan Penetapan Perda APBD Tepat Waktu untuk DID Tahun 2017-2021 dan Proyeksinya untuk DID Tahun 2022-2023	18
Tabel 1. 9 Perkembangan Pelaksanaan E-Procurement untuk DID Tahun 2018-2021 dan Proyeksinya untuk DID Tahun 2022-2024.....	19
Tabel 1.10 Perkembangan Pelaksanaan E-Budgeting untuk DID Tahun 2018-2021 dan Proyeksinya untuk DID Tahun 2022-2024.....	19
Tabel 1.11 Perkembangan Ketersediaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk DID Tahun 2019-2020.....	20
Tabel 1.12 Koefisien Korelasi Antar Kategori Kinerja Daerah Penerima DID Tahun 2021: Besaran Alokasi DID.....	22
Tabel 1.13 Koefisien Korelasi Antar Kategori Kinerja Daerah Penerima DID Tahun 2021: Daerah Penerima DID.....	24
Tabel 1.14 Koefisien Korelasi Menurut Kategori Kinerja Daerah Penerima DID Antar Tahun 2020 dan 2021: Daerah Penerima DID	25
Tabel 1.15 Waktu (Tahun) dan Sumber Data untuk DID Tahun 2021	26
Tabel 1.16 Berbagai Usulan uang Masuk untuk Indikator dalam DID Tahun 2022.....	28
Tabel 1.17 Statistik Deskriptif Rasio PDRD per PDRB Non Migas Harga Berlaku untuk DID Tahun 2020 (Persen)	29
Tabel 1.18 Korelasi Pajak Daerah dan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2016	30
Tabel 1.19 Korelasi Retribusi Daerah dan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2016	31
Tabel 1.20 Statistik Deskriptif Belanja Modal Pendidikan Non-Kantor Terhadap Belanja Pendidikan untuk DID Tahun 2021 (Persen).....	32
Tabel 1.21 Statistik Deskriptif Belanja Modal Kesehatan untuk DID Tahun 2021 (Persen).....	33
Tabel 1.22 Statistik Deskriptif Peta Mutu Pendidikan Sekolah Menengah untuk DID Tahun 2021	34
Tabel 1.23 Statistik Deskriptif Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah untuk DID Tahun 2021	35
Tabel 1.24 Statistik Deskriptif Penangan <i>Stunting</i> Balita untuk DID Tahun 2021 (Persen)	36

Tabel 1.25 Statistik Deskriptif Balita yang Mendapatkan Imunisasi Lengkap untuk DID Tahun 2021 (Persen).....	37
Tabel 1.26 Statistik Deskriptif Persalinan di Fasilitas Kesehatan untuk DID Tahun 2021 (Persen).....	38
Tabel 1.27 Statistik Deskriptif Sumber Air Minum Layak untuk DID Tahun 2021 (Persen).....	40
Tabel 1.28 Statistik Deskriptif Akses Sanitasi Layak untuk DID Tahun 2021 (Persen).....	42
Tabel 1.29 Keterangan Terkait Algoritma Perhitungan Sanitasi Layak.....	44
Tabel 1.30 Statistik Deskriptif Persentase Penduduk Miskin untuk DID Tahun 2021 (Persen).....	45
Tabel 1.31 Statistik Deskriptif IPM untuk DID Tahun 2021.....	46
Tabel 1.32 Statistik Deskriptif TPT untuk DID Tahun 2021.....	47
Tabel 1.33 Statistik Deskriptif LPPD untuk DID Tahun 2021.....	48
Tabel 1.34 Statistik Deskriptif SAKIP untuk DID tahun 2021.....	49
Tabel 1.35 Statistik Deskriptif Peningkatan Investasi untuk DID Tahun 2021 (Nilai Ln).....	51
Tabel 1.36 Statistik Deskriptif Peningkatan Ekspor untuk DID Tahun 2021 (Nilai Ln).....	52
Tabel 1.37 Statistik Deskriptif Indeks Pencegahan Korupsi untuk DID Tahun 2021 (Rp. Miliar).....	54

Daftar Gambar

Gambar 1.1 Alokasi DID Tahun 2010-2021 (Rp. Triliun).....	1
Gambar 1.2 Alokasi DID terhadap TKDD dan APBN Tahun 2010-2021 (Persen).....	8
Gambar 1.3 Jumlah ALokasi DID Tahun 2010-2021 Menurut Pemerintah Daerah (Rp. Triliun).....	10
Gambar 1.4 Porsi ALokasi DID Tahun 2010-2021 Menurut Pemerintah Daerah (Persen).....	10
Gambar 1.5 Jumlah Daerah Penerima DID Menurut Pemerinta Daerah Tahun 2010-2021.....	11
Gambar 1.6 Persentase Daerah Penerima DID Menurut Pemerintah Daerah Tahun 2010-2021 (Persen).....	11
Gambar 1.7 Rata-Rata Alokasi DID Menurut Pemerintah Daerah Tahun 2010-2021 (Rp. Miliar/Pemerintah Daerah).....	12
Gambar 1.8 Rata-Rata Persentase DID terhadap TKDD Daerah Penerima Menurut Pemerintah Daerah Tahun 2011-2020 (Persen).....	12
Gambar 1.9 Rata-Rata Persentase DID terhadap APBD Daerah Penerima Menurut Pemerintah Daerah Tahun 2011-2020 (Persen).....	13
Gambar 1.10 Peraturan BPKM Tahun 2021 terkait Penilaian Kinerja PTSP.....	20
Gambar 1.11 Aplikasi SIKD.....	34
Gambar 1.13 Diagram Algoritma Perhitungan Sanitasi Layak.....	43
Gambar 1.14 Perbedaan Pengukuran Kinerja TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota.....	53

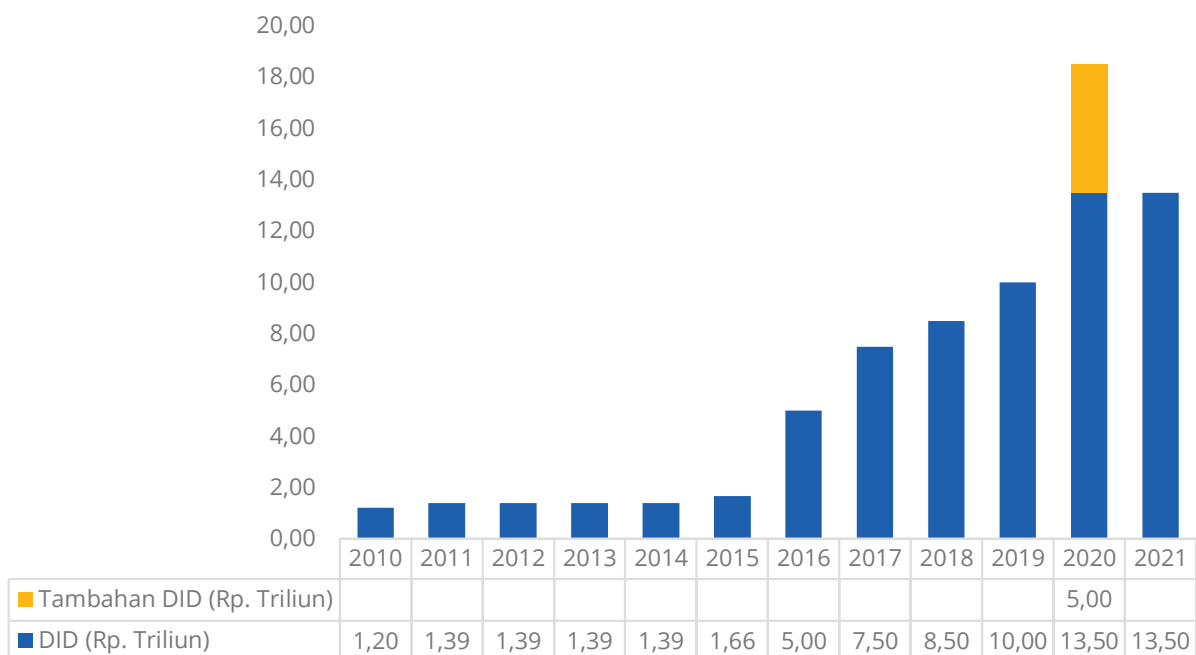
DAFTAR SINGKATAN

APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional
APIP	Aparat pengawasan Intern Pemerintah
APM	Angka Partisipasi Murni
Baduta	Bawah usia dua tahun
Balita	bawah usia lima tahun
BKPM	Badan Koordinasi Penanaman Modal
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan
BPS	Badan Pusat Statistik
COVID-19	<i>Corona Virus Disease 2019</i>
DID	Dana Insentif Daerah
DJPK	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
IKLH	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
IPG	Indeks Pemerataan Guru
IPM	Indeks Pembangunan Manusia
KOMPAK	Program Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan
LKPD	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
PDRD	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
PDRB	<i>Produk Domestik Regional Bruto</i>
PERPU	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
PMK	Peraturan Menteri Keuangan
PMP	Peta Mutu Pendidikan
PNS	Pegawai Negeri Sipil
PPD	Perencanaan Pembangunan Daerah
PTSP	Pelayanan Terpadu Satu Pintu
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Sakernas	Statistik Tenaga Kerja Nasional
SAKIP	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
SIKD	Sistem Informasi Keuangan Daerah
SKB	Surat Keputusan Bersama
SPM	Standar Pelayanan Minimum
PT SMI	(PT) Sarana Multi Infrastruktur
SiLPA	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan
SMP	Sekolah Menengah Pertama
3T	Tertinggal, Terdepan dan Terluar
TKDD	Transfer ke Daerah dan Dana Desa
TPID	Tim Pengendalian Inflasi Daerah
TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka
TPS3R	Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, dan Recycle
UN	Ujian Nasional
UU	Undang-Undang
WTP	Wajar Tanpa Pengecualian

A

PENDAHULUAN

Dana Insentif Daerah (DID) merupakan bagian dari dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/ atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat. DID telah dialokasikan kepada daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota sejak tahun 2010, dan direncanakan terus dilanjutkan untuk tahun 2022, dengan besaran alokasinya yang terus meningkat secara signifikan khususnya dalam periode tahun 2016-2020. Kebijakan pengelolaan DID selama ini diatur dalam Undang-Undang tentang APBN (tiap tahun), Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Presiden tentang Rincian APBN (tiap tahun) dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Untuk DID tahun 2021, PMK yang mengatur terkait pengelolaan DID adalah PMK No. 167/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas PMK No. 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah.



Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan, 2021

Gambar 1.1 Alokasi DID Tahun 2010-2021 (Rp. Triliun)

Dalam penganggaran dan pengalokasian DID, terdapat beberapa hal yang diatur, khususnya dalam No. 141/PMK.07/2019, antara lain berupa indikasi kebutuhan Dana TKDD untuk DID, penyediaan data DID, dan penghitungan dan penetapan alokasi DID untuk DID tahun depannya. Penganggaran dan pengalokasian DID untuk tahun 2021 telah dilakukan dan diumumkan oleh Pemerintah lebih maju dari tahun sebelumnya, dimana untuk tahun 2021 diumumkan pada akhir bulan September 2020 (sebelumnya pada akhir Oktober 2019), dengan total alokasi sebesar Rp. 13.5 triliun, yang didistribusikan kepada 426 Pemerintah Daerah (312 kabupaten, 84 kota dan 30 provinsi) yang berhak menerima sesuai dengan capaian pemenuhan kriteria utama dan kategori kinerja. Besaran alokasi DID tahun 2020 yang ditetapkan sebesar Rp. 13,5 triliun tersebut tertuang dalam UU Nomor 9 Tahun 2020 tentang APBN Tahun 2021 dan terinci dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 untuk setiap daerah penerimanya (provinsi dan kabupaten/kota).

Kebijakan DID untuk tahun 2021 merupakan perbaikan dari kebijakan DID tahun 2020, terutama terkait dengan penghitungan alokasi DID. Kebijakan DID tahun 2021 dilakukan dengan:

- ☑ Mengedepankan kriteria kinerja yang dinamis dan strategis untuk mendorong daerah lebih kompetitif, seperti penurunan angka pengangguran, kinerja pengendalian inflasi, indeks pencegahan korupsi
- ☑ Menyederhanakan dan menjaga konsistensi formula DID
- ☑ Mendorong kemandirian daerah dan peningkatan kualitas belanja APBD
- ☑ Mempertajam indikator yang selaras dengan pencapaian prioritas nasional
- ☑ Memperkuat indikator yang memiliki dampak besar terhadap perekonomian nasional
- ☑ Mengalokasikan sebagian DID pada tahun berjalan dengan menggunakan data kinerja tahun berjalan/termutakhir dalam rangka pemulihan ekonomi di daerah
- ☑ Penggunaan DID: (i) Digitalisasi pelayanan bidang Pendidikan dan Kesehatan; dan (ii) Pemulihan ekonomi termasuk pemberdayaan UMKM, industri kecil, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
- ☑ Penyaluran berdasarkan kinerja tahun sebelumnya dan kinerja tahun berjalan

Terdapat penambahan dan penghapusan indikator kinerja yang digunakan pada DID tahun 2021, seperti yang terinci dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.1 Penambahan Indikator/Variabel DID Tahun 2021

No.	Kategori	Variabel	Keterangan
1	SIKD	Hasil penilaian diatas 95%	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mendorong kinerja Pemda untuk melakukan pelaporan transaksi harian secara <i>real-time</i>. ➤ Penilaian dilakukan berdasarkan interkoneksi SIKD yang meliputi antara lain registrasi, status koneksi agen SIKD dan penyampaian data.
2	Penurunan Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	Merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Digunakan pada perhitungan DID TA 2021 untuk mendorong penurunan angka pengangguran selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020.
3	Pengendalian Inflasi Daerah	Penerima penghargaan TPID Award	Mendorong kinerja pemerintah daerah dalam pengendalian inflasi di daerah.
4	Pencegahan Korupsi	Indeks Pencegahan Korupsi	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pencegahan korupsi di pemerintah daerah dilakukan melalui program koordinasi dan supervisi pencegahan-korsupgah. KPK bersama kemendagri dan instansi lain mendampingi pemerintah daerah dalam pembangunan sistem, perbaikan tata kelola pemerintahan daerah. Sistem diimplementasikan untuk mengurangi resiko terjadinya tindak pidana korupsi. ➤ Penilaian dilakukan berdasarkan capaian kemajuan implementasi perbaikan di perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, PTSP, APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah manajemen asset daerah, tata Kelola desa.

Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan, 2021

Tabel 1.2 Indikator yang Tidak Digunakan Lagi pada DID Tahun 2021

Kategori	Variabel	Keterangan
<i>Creative Financing</i>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penilaian hanya dilakukan terhadap Pemda yang melakukan pinjaman ke PT. SMI. ➤ Pemda yang melakukan pinjaman hanya sebanyak 29 Pemda. 	Indikator ini tidak digunakan dalam perhitungan alokasi DID 2021 karena tidak memenuhi azas fairness untuk semua daerah.
<i>Mandatory Spending</i>	Merupakan kewajiban Pemda yang harus dipenuhi sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan.	Tidak digunakan Kembali dalam perhitungan alokasi DID 2021.
Ketepatan Waktu Pelaporan	Merupakan kewajiban Pemda yang harus dipenuhi sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan.	Tidak digunakan Kembali dalam perhitungan alokasi DID 2021.
Rata-rata nilai Ujian Nasional	Data tidak tersedia karena tidak ada pelaksanaan UN pada tahun 2020	Tidak digunakan Kembali dalam perhitungan alokasi DID 2021.

Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan, 2021

Sehingga, apabila dirinci, kebijakan DID tahun 2021 dalam penghitungan alokasi DID masih mempertahankan 4 kriteria utama seperti pada tahun 2019 dan 2020, dan terdapat 11 kelompok kategori kinerja yang terinci dalam 24 indikator kinerja. Kriteria utama yang dimaksudkan adalah:

- a. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
- b. Penetapan Peraturan Daerah mengenai APBD tepat waktu;
- c. Pelaksanaan *e-government* (*e-procurement* dan *e-budgeting*); dan/ atau
- d. Ketersediaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Sementara itu, untuk kategori kinerja yang terbagi dalam 11 kategori dan 24 indikator secara rinci dapat dilihat dalam Tabel 1.3 berikut ini:

Tabel 1.3 Kategori Kinerja dalam Penghitungan Alokasi DID Tahun 2021

No.	Kelompok Kategori dan Jenis Kategori Kinerja	
1	Kategori Peningkatan Investasi	
2	Kategori Peningkatan Ekspor	
3	Kategori Kesehatan	Kemandirian Daerah
4	Fiskal dan pengelolaan keuangan Daerah	Efektifitas
5		Kualitas Belanja Modal Pendidikan
		Pengelolaan Belanja Daerah
		Kualitas Belanja Modal Kesehatan
6	Sistem Informasi Keuangan Daerah	
7	Kategori Pelayanan Dasar Publik Bidang Pendidikan	Peta Mutu Pendidikan
8		Angka Partisipasi Murni
9	Kategori Pelayanan Dasar Publik Bidang Kesehatan	Penanganan <i>Stunting</i>
10		Balita yang Mendapatkan Imunisasi Lengkap
11		Persalinan di Fasilitas Kesehatan
12	Kategori Pelayanan Dasar Publik Bidang Infrastruktur	Sumber Air Minum Layak
13		Akses Sanitasi Layak
14	Kategori Kesejahteraan Masyarakat	Penurunan Penduduk Miskin
15		Persentase Penurunan Angka Pengangguran
16		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

No.	Kelompok Kategori dan Jenis Kategori Kinerja	
17	Kategori Pelayanan Umum Pemerintahan	Penyelenggaraan Pemerintah
18		Perencanaan Pembangunan Daerah
19		Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
20		Inovasi Daerah
21		Inovasi Pelayanan Publik Inovasi Pemerintahan Daerah
22	Kategori Pengelolaan Sampah	
23	Kategori Pengendalian Inflasi	
24	Kategori Pencegahan Korupsi	

Sumber: DJPK Kementerian Keuangan, 2021

Terkait dengan rencana kebijakan penganggaran dan pengalokasian DID untuk tahun 2022, perlu dilakukan usulan indikasi kebutuhan dana TKDD untuk DID dan juga usulan penghitungan dan penetapan alokasi DID. Usulan tersebut dapat dilakukan dengan melakukan *review* terlebih dahulu terhadap kebijakan DID tahun-tahun sebelumnya, khususnya tahun 2021, serta usulan kemungkinan perbaikannya untuk tahun 2022 ke depan. Usulan perbaikan untuk tahun 2022 ke depan tentunya juga menyesuaikan dengan berbagai kebijakan dan kondisi terbaru terkait dengan keuangan negara, khususnya terkait dengan kegiatan pencegahan dan/atau penanganan COVID-19.

B

TUJUAN

Tujuan dari penyusunan kajian tentang *Review* Penganggaran dan Pengalokasian DID Tahun 2021 dan Usulan Perbaikannya untuk Tahun 2022 ini adalah untuk:

- a. Memperkirakan besaran penganggaran terkait dengan nilai indikasi kebutuhan Dana TKDD untuk DID tahun 2022 ke depan;
- b. *Me-review* penghitungan alokasi DID tahun 2021, baik untuk kriteria utama maupun kriteria kinerja; dan
- c. Menyusun saran/rekomendasi terkait penganggaran dan penghitungan alokasi DID tahun 2022 ke depan.



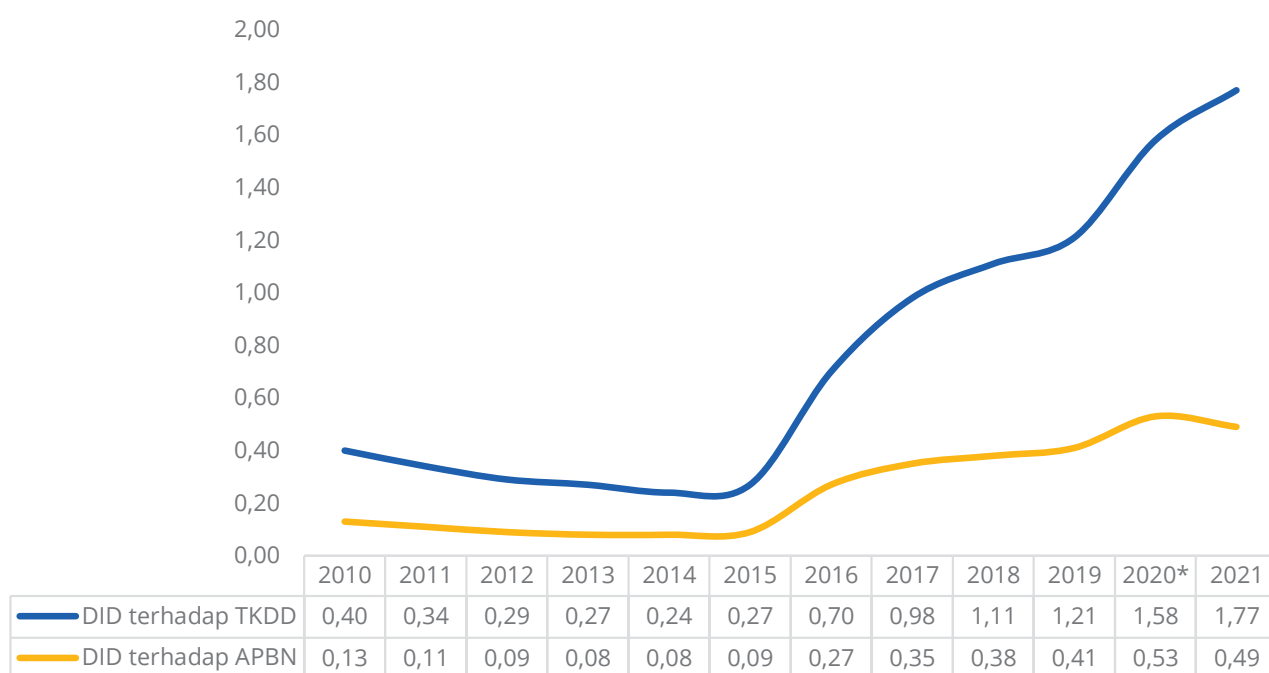
INDIKASI KEBUTUHAN DANA TKDD UNTUK DID TAHUN 2022

Seperi yang telah dijelaskan sebelumnya, nilai dana TKDD untuk DID yang telah dialokasikan sejak tahun 2010, mengalami peningkatan yang cukup signifikan sejak tahun 2016 sampai dengan 2020, dimana pada tahun 2020 alokasi semulanya mencapai Rp. 15 triliun dan setelah penyesuaian menjadi Rp. 13,5 triliun. Untuk memperkirakan indikasi kebutuhan dana TKDD untuk DID Tahun 2022, setidaknya perlu mempertimbangkan perkembangan DID dalam 3 (tiga) tahun terakhir, arah kebijakan DID, dan/atau kemampuan keuangan negara. Alokasi DID Reguler (tidak termasuk DID Tambahan) dalam 3 tahun terakhir mengalami peningkatan yang signifikan, dari Rp. 8,5 triliun pada tahun 2018, meningkat menjadi Rp. 10 triliun (naik 18 persen) pada tahun 2019 dan kembali meningkat signifikan menjadi Rp. 13,5 triliun setelah penyesuaian (naik 35 persen) pada tahun 2020 dan 2021.

Arah kebijakan DID pada tahun 2022 tentunya merupakan perbaikan dari kebijakan DID tahun-tahun sebelumnya, khususnya tahun 2021, dengan tetap perlu mempertahankan kondisi eksisting yang masih penting dan hal-hal baru yang relevan dengan prioritas nasional. Terkait dengan hal tersebut, pokok-pokok kebijakan DID pada tahun 2022 sebaiknya melanjutkan kebijakan DID tahun-tahun sebelumnya meliputi:

- ☑ Pengalokasian DID berdasarkan kinerja tahun sebelumnya dan tahun berjalan dengan menggunakan indikator kinerja dan formula yang sama dengan tahun sebelumnya.
- ☑ Penggunaan DID untuk mendukung pencapaian prioritas nasional seperti bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Bila dilihat persentase dana DID terhadap TKDD, persentasenya terus meningkat khususnya dalam periode tahun 2015-2021, dimana pada tahun 2021 alokasi DID mencapai 1,77 persen dari TKDD (setelah penyesuaian), yang tadinya hanya sekitar 0,27 persen pada tahun 2015. Sedangkan bila dibandingkan dengan belanja APBN, alokasi DID juga mengalami peningkatan, namun persentasenya masih di bawah 1 persen dari belanja APBN pada tahun 2021. Pada tahun 2021, persentase alokasi DID terhadap belanja APBN mencapai 0,49 persen, yang meningkat dari 0,09 persen pada tahun 2015. Hal ini tentunya belum terlalu membebani APBN ke depan apabila alokasi DID untuk tahun 2022 ditingkatkan dari alokasi DID untuk tahun 2021.



Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan, 2020

Gambar 1.2 Alokasi DID terhadap TKDD dan APBN Tahun 2010-2021 (Persen)

Dengan pertimbangan *trend* alokasi anggaran DID setidaknya selama 3 tahun terakhir (2019-2021) tersebut atau bahkan bila dilihat perkembangannya selama 7 tahun terakhir (2015-2021), pertimbangan arah kebijakan DID pada tahun 2022 yang semakin banyak, dan beban alokasi DID dalam TKDD dan APBN (keuangan negara) yang belum terlampaui besar, indikasi kebutuhan dana TKDD untuk DID pada tahun 2022 sebaiknya tidak menurun, minimal dapat dipertahankan dan bahkan sebaiknya dapat ditingkatkan dari tahun sebelumnya (tahun 2021).

Dengan menggunakan analisa *trend linier* terhadap alokasi anggaran DID selama 7 tahun terakhir (2015-2021), setidaknya dana TKDD untuk DID pada tahun 2022 diperkirakan sebesar Rp. 16,4 triliun. Apabila analisa *trend linier* dilakukan untuk persentase DID terhadap TKDD, besaran dana TKDD untuk DID pada tahun 2022 diperkirakan dapat mencapai Rp. 17,5 triliun (2,01 persen terhadap TKDD). Apabila analisa *trend linier*

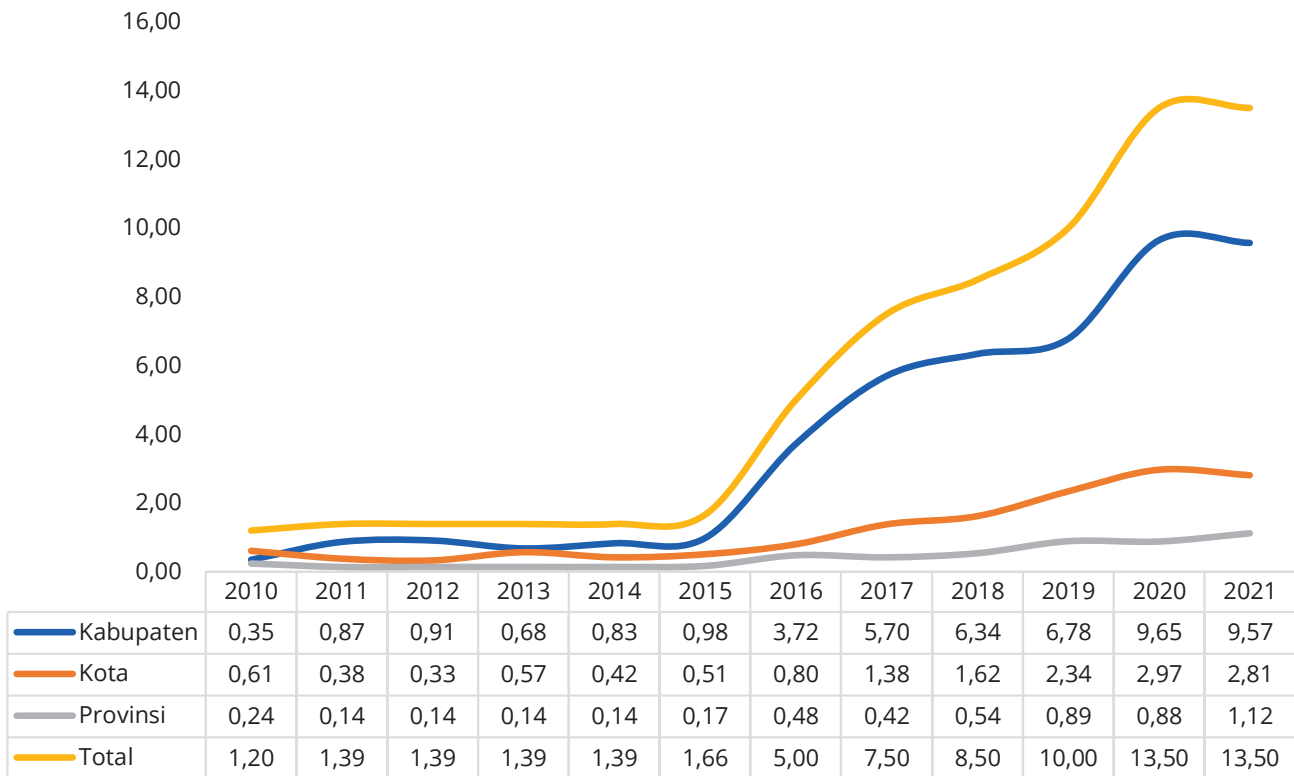
dilakukan untuk persentase DID terhadap APBN, besaran dana TKDD untuk DID pada tahun 2022 diperkirakan dapat mencapai Rp. 17,8 triliun (0,62 persen terhadap belanja APBN). Dengan kata lain, apabila digabungkan dari semua perkiraan, maka sebaiknya dana TKDD untuk DID pada tahun 2021 dapat ditingkatkan menjadi minimal menjadi Rp. 16,4 triliun (meningkat minimal 21,34 persen dari tahun 2021). Hal tersebut tentunya dengan asumsi bahwa wabah pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia telah mulai mereda dan kondisi keuangan negara sudah membaik dan stabil.

Tabel 1.4 Indikasi Kebutuhan Dana TKDD untuk DID Tahun 2021

No.	Dasar Perkiraan	Indikasi Kebutuhan DID 2022 (Rp. Miliar)	Peningkatan dari DID 2021 (Persen)
1	Nilai Alokasi DID Tahun 2015-2021	16,382	21.34
2	Persentase DID terhadap TKDD Tahun 2015-2021 → 2,01% terhadap TKDD 2022	17,505	29.67
3	Persentase DID terhadap APBN Tahun 2015-2021 → 0,62% terhadap APBN 2022	17,800	31.85

Sumber: Hasil Pengolahan, 2021

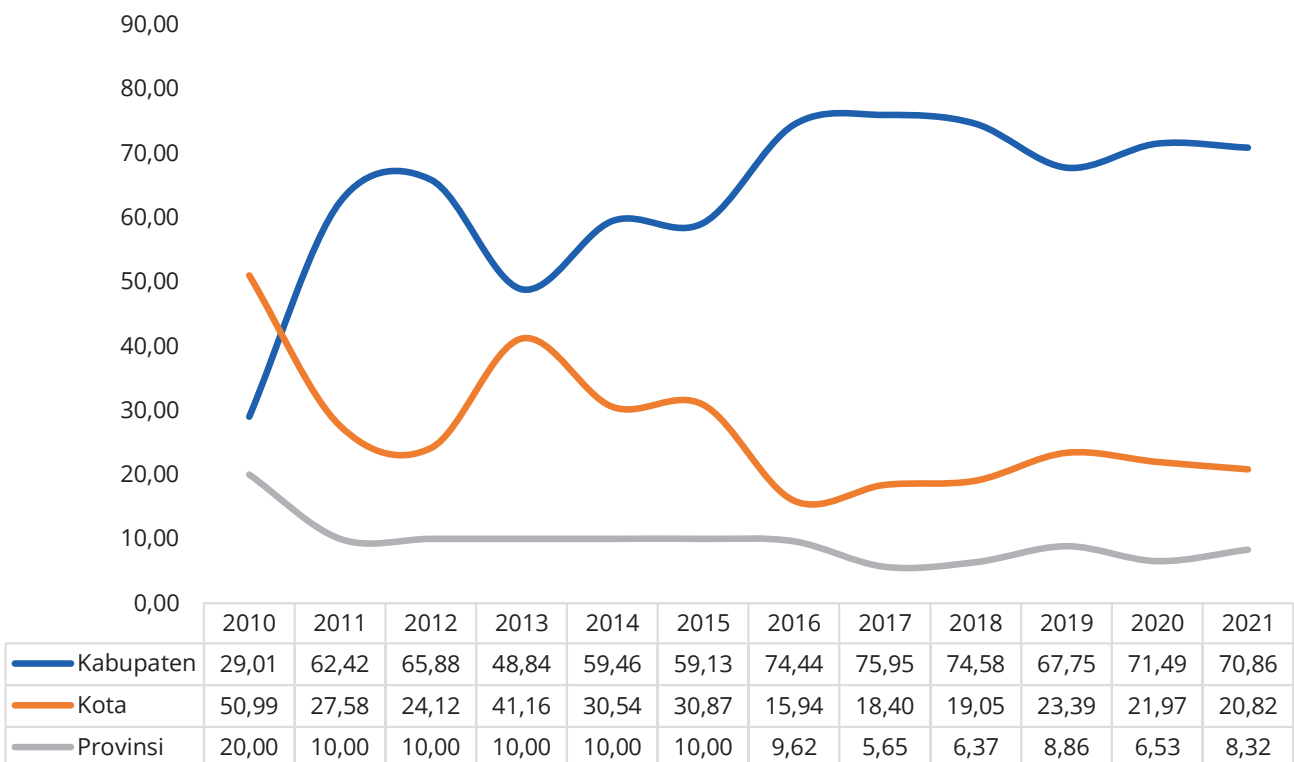
Alasan lain yang dapat mendukung perlunya peningkatan indikasi kebutuhan dana TKDD untuk DID pada tahun 2022 adalah masih relatif rendahnya persentase penerimaan DID yang diterima oleh Pemerintah Daerah (daerah penerima DID), baik persentase penerimaan DID terhadap TKDD maupun persentase penerimaan DID terhadap APBD selama ini. Hal tersebut secara rinci dapat dilihat dalam Gambar 7 sampai dengan Gambar 9. Dengan semakin besarnya peranan DID dalam TKDD dan penerimaan APBD Pemerintah Daerah, diharapkan daerah dapat semakin berkompetisi dengan baik dan sehat dalam meningkatkan kinerja pemerintahannya dalam berbagai aspek, baik untuk kriteria utama maupun kategori kinerja. Besaran alokasi DID yang diterima oleh Pemerintah Daerah dan kontribusinya baik terhadap TKDD maupun penerimaan APBD sangat dipengaruhi oleh besaran indikasi kebutuhan dana TKDD untuk DID dan jumlah daerah penerima DID. Oleh karena itu, peningkatan indikasi kebutuhan dana TKDD untuk DID dan pembatasan/pengurangan jumlah daerah penerima DID dapat meningkatkan signifikansi besaran alokasi DID yang diterima oleh Pemerintah Daerah dan kontribusinya baik terhadap TKDD maupun penerimaan APBD.



Keterangan: *) Tidak Termasuk DID Tambahan

Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan, 2021

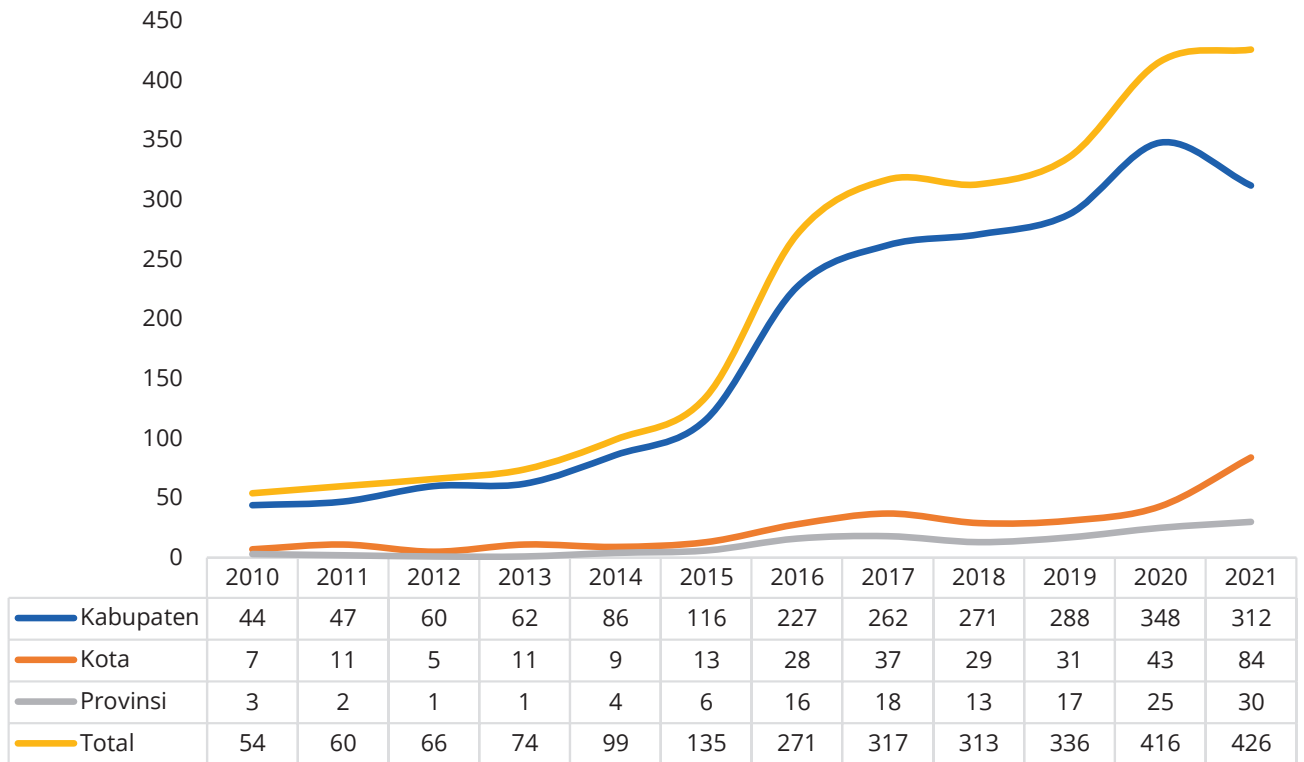
Gambar 1.3 Jumlah Alokasi DID Tahun 2010-2021 Menurut Pemerintah Daerah (Rp. Triliun)



Keterangan: *) Tidak Termasuk DID Tambahan

Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan, 2021

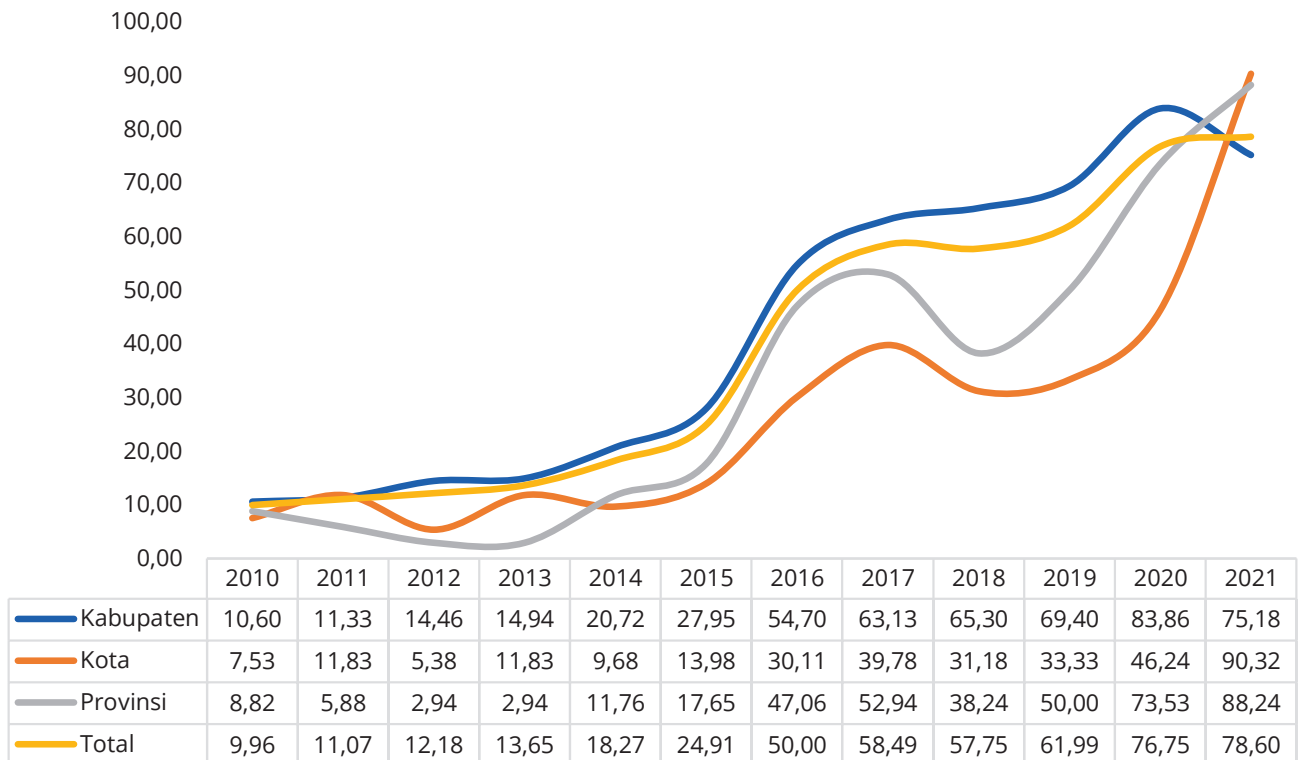
Gambar 1.4 Porsi Alokasi DID Tahun 2010-2021 Menurut Pemerintah Daerah (Persen)



Keterangan: *) Tidak Termasuk DID Tambahan

Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan, Diolah, 2021

Gambar 1.5 Jumlah Daerah Penerima DID Menurut Pemerintah Daerah Tahun 2010-2021

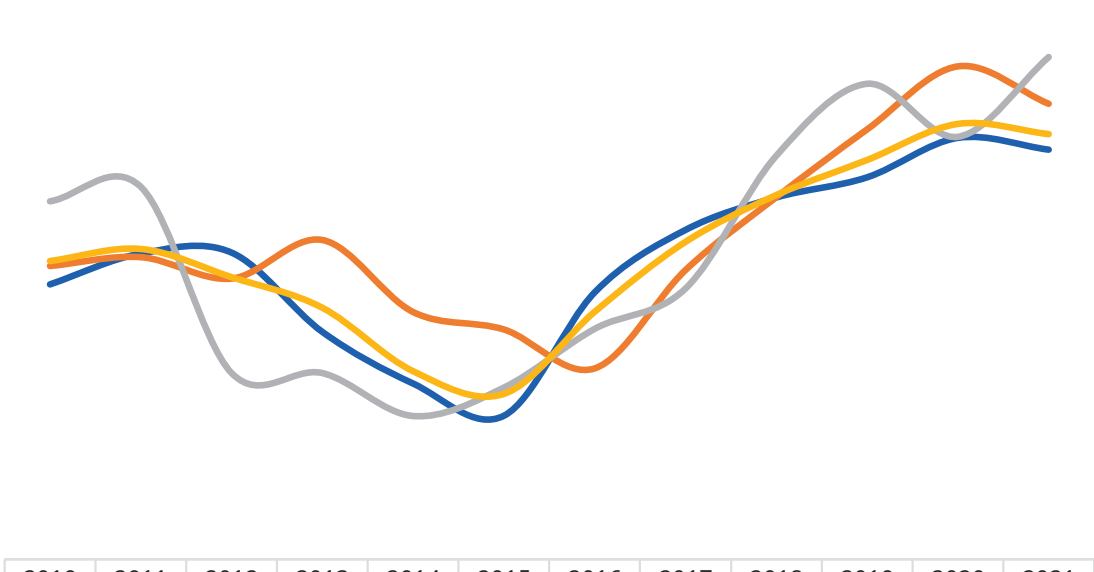


Keterangan: *) Tidak Termasuk DID Tambahan

Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan, Diolah, 2021

Gambar 1.6 Persentase Daerah Penerima DID Menurut Pemerintah Daerah Tahun 2010-2021 (Persen)

40,00
35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00



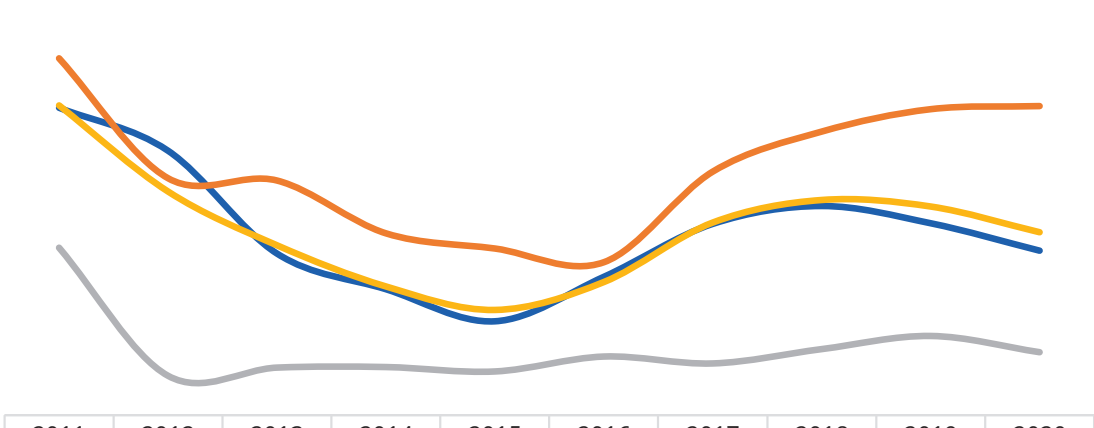
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kabupaten	20,49	22,79	22,86	16,95	13,10	10,70	19,90	24,55	26,97	28,47	31,41	30,53
Kota	21,86	22,52	20,92	23,80	18,43	17,13	14,23	21,56	26,99	32,04	36,74	33,95
Provinsi	26,68	27,76	13,88	13,88	10,68	12,80	17,18	20,18	30,08	35,44	31,49	37,43
Total	22,23	23,13	21,03	18,75	14,02	12,33	18,45	23,66	27,15	29,76	32,45	31,69

Keterangan: *) Tidak Termasuk DID Tambahan

Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan, Diolah, 2021

Gambar 1.7 Rata-Rata Alokasi DID Menurut Pemerintah Daerah Tahun 2010-2021 (Rp. Miliar/Pemerintah Daerah)

4,50
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00

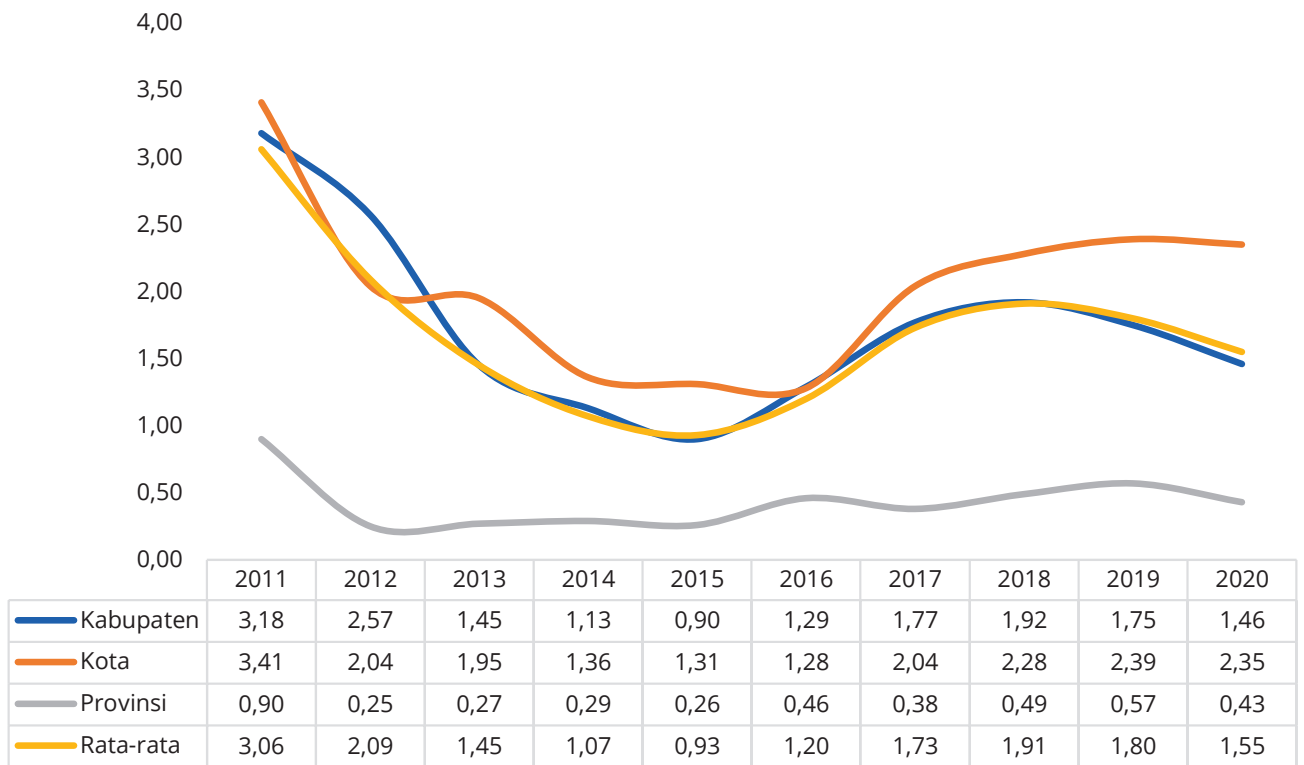


	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kabupaten	3,51	3,02	1,84	1,44	1,07	1,58	2,18	2,39	2,19	1,88
Kota	4,07	2,70	2,68	2,08	1,90	1,75	2,78	3,24	3,49	3,53
Provinsi	1,91	0,45	0,54	0,55	0,50	0,67	0,59	0,75	0,90	0,72
Rata-rata	3,54	2,55	1,94	1,47	1,20	1,52	2,20	2,46	2,38	2,09

Keterangan: *) Tidak Termasuk DID Tambahan

Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan, Diolah, 2020

Gambar 1.8 Rata-Rata Persentase DID terhadap TKDD Daerah Penerima Menurut Pemerintah Daerah Tahun 2011-2020 (Persen)



Keterangan: *) Tidak Termasuk DID Tambahan

Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan, Diolah, 2020

Gambar 1.9 Rata-Rata Persentase DID terhadap APBD Daerah Penerima Menurut Pemerintah Daerah Tahun 2011-2020 (Persen)



REVIEW PENGHITUNGAN ALOKASI DID TAHUN 2021 DAN USULAN PERBAIKAN UNTUK DID TAHUN 2022

D.1 Kriteria Utama

Kriteria utama merupakan kriteria yang harus dimiliki oleh suatu daerah sebagai penentu kelayakan daerah penerima DID. Dalam penghitungan alokasi DID Tahun 2021, terdapat 4 kriteria utama, yaitu:

- a. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
- b. Penetapan Peraturan Daerah mengenai APBD tepat waktu;
- c. Pelaksanaan *e-government* (*e-procurement* dan *e-budgeting*); dan/ atau
- d. Ketersediaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Dalam hal Menteri/pimpinan lembaga nonkementerian terkait tidak melakukan penilaian atau menyediakan data kriteria utama, kriteria utama tersebut tidak diperhitungkan dalam pengalokasian DID.

Daerah yang memenuhi kriteria utama menjadi hal yang paling penting dalam menentukan suatu daerah untuk mendapatkan alokasi DID atau tidak. Dengan kata lain, kriteria utama jauh lebih penting dibandingkan dengan kategori kinerja. Bila dilihat dalam perkembangannya, daerah yang bukan penerima DID adalah sebagian besar daerah yang tidak memenuhi kriteria utama (*eligible*). Hal tersebut ditunjukkan juga oleh semakin menurunnya jumlah daerah yang telah memenuhi kriteria utama (*eligible*) namun bukan penerima DID dari DID tahun 2017 sampai dengan DID 2021 (lihat Tabel 5).

Tabel 1.5 Perkembangan Jumlah Daerah yang Memenuhi Kriteria Utama (*Eligible*) dan Daerah Penerima DID Tahun 2017-2021

No.	Keterangan	DID 2017				DID 2018			
		Kab.	Kota	Prov.	Total	Kab.	Kota	Prov.	Total
1	Jumlah Daerah	415	93	34	542	415	93	34	542
2	Daerah Eligible	318	78	23	419	238	63	23	324
3	Daerah Tidak Eligible	97	15	11	123	177	30	11	218
4	Daerah Penerima DID	232	64	21	317	235	60	18	313
5	Daerah Bukan Penerima DID	183	29	13	225	180	33	16	229
6	Daerah Eligible Namun Bukan Penerima DID	86	14	2	102	3	3	5	11

No.	Keterangan	DID 2019				DID 2020			
		Kab.	Kota	Prov.	Total	Kab.	Kota	Prov.	Total
1	Jumlah Daerah	415	93	34	542	415	93	34	542
2	Daerah Eligible	272	79	30	381	313	82	30	425
3	Daerah Tidak Eligible	143	14	4	161	102	11	4	117
4	Daerah Penerima DID	237	74	25	336	308	80	28	416
5	Daerah Bukan Penerima DID	178	19	9	206	107	13	6	126
6	Daerah Eligible Namun Bukan Penerima DID	35	5	5	45	5	2	2	9

No.	Keterangan	2021			
		Kab.	Kota	Prov.	Total
1	Jumlah Daerah	415	93	34	542
2	Daerah Eligible	329	86	30	445
3	Daerah Tidak Eligible	86	7	4	97
4	Daerah Penerima DID	312	84	30	426
5	Daerah Bukan Penerima DID	103	9	4	116
6	Daerah Eligible Namun Bukan Penerima DID	17	2	0	19

Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan, Diolah, 2021

Perkembangan dari 4 kriteria utama tersebut di daerah dari waktu ke waktu mengalami perbaikan, bahkan untuk ketersediaan PTSP sudah seluruh daerah, baik provinsi, kabupaten dan kota. Perbaikan tersebut ditandai dengan peningkatan jumlah daerah yang mampu memenuhi 4 kriteria utama tersebut dari waktu ke waktu. Untuk DID tahun 2021, terdapat 445 daerah atau sekitar 82,1 persen daerah yang telah memenuhi kriteria

utama (lihat Tabel 5 dan Tabel 6). Bila dianalisa dengan *trend linier*, untuk 4 kriteria utama tersebut, diperkirakan seluruh daerah akan mampu menerapkannya untuk DID tahun 2024.

Untuk DID tahun 2022, beberapa kriteria utama masih perlu dipertahankan, mengingat belum semua daerah mampu memenuhinya dan daerah yang telah memenuhi kriteria utama perlu mempertahankannya dari waktu ke waktu. Beberapa kriteria utama yang perlu dipertahankan adalah:

- a. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), karena diperkirakan akan tercapai untuk seluruh daerahnya adalah untuk DID tahun 2023 (lihat Tabel 7);
- b. Penetapan Peraturan Daerah mengenai APBD tepat waktu, karena diperkirakan akan tercapai untuk seluruh daerahnya untuk DID tahun 2022 (lihat Tabel 8); dan
- c. Pelaksanaan e-government (*e-procurement* dan *e-budgeting*), karena diperkirakan akan tercapai untuk seluruh daerahnya untuk DID tahun 2024 (lihat Tabel 9 dan Tabel 10).

Sementara itu, untuk kriteria utama berupa Ketersediaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), untuk DID tahun 2021 sebaiknya tidak perlu dimasukkan lagi karena sejak DID tahun 2019 dan berlanjut pada DID tahun 2020, kriteria ini telah tercapai untuk seluruh daerahnya (lihat Tabel 11). Pada awal tahun 2021, sudah ada Peraturan Kepala BKPM terkait dengan penilaian PTSP, dan jika data tersebut sudah lengkap tersedia, maka dapat menggantikan indikator ketersediaan PTSP atau dijadikan sebagai indikator kinerja pada DID tahun 2022.

Tabel 1.6 Perkembangan Jumlah Daerah yang Memenuhi Kriteria Utama DID Tahun 2017-2021

Jumlah Pemerintah Daerah						
No.	Daerah	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kabupaten	318	238	272	313	329
2	Kota	78	63	79	82	86
3	Provinsi	23	23	30	30	30
Total		419	324	381	425	445

Persentase Pemerintah Daerah						
No.	Daerah	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kabupaten	76.63	57.35	65.54	75.42	79.28
2	Kota	83.87	67.74	84.95	88.17	92.47
3	Provinsi	67.65	67.65	88.24	88.24	88.24
Total		77.31	59.78	70.3	78.41	82.10

Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan, Diolah, 2021

Tabel 1.7 Perkembangan Opini BPK WTP Atas LKPD untuk DID Tahun 2017-2020 dan Proyeksinya untuk DID Tahun 2021-2023

		Jumlah Pemerintah Daerah					Proyeksi	
No.	Daerah	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kabupaten	223	275	298	327	354	390	415
2	Kota	60	72	80	84	87	93	93
3	Provinsi	29	31	33	32	34	34	34
Total		312	378	411	443	475	525	542

		Persentase Pemerintah Daerah					Proyeksi	
No.	Daerah	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kabupaten	53.73	66.27	71.81	78.80	85.30	93.98	100.00
2	Kota	64.52	77.42	86.02	90.32	93.55	100.00	100.00
3	Provinsi	85.29	91.18	97.06	94.12	100.00	100.00	100.00
Total		57.56	69.74	75.83	81.73	87.64	96.86	100.00

Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan, Diolah, 2020

Tabel 1.8 Perkembangan Penetapan Perda APBD Tepat Waktu untuk DID Tahun 2017-2021 dan Proyeksinya untuk DID Tahun 2022-2023

		Jumlah Pemerintah Daerah					Proyeksi	
No.	Daerah	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kabupaten	342	335	369	391	383	405	415
2	Kota	79	75	87	92	90	93	93
3	Provinsi	23	25	30	31	31	34	34
Total		444	435	486	514	504	532	542

		Persentase Pemerintah Daerah					Proyeksi	
No.	Daerah	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kabupaten	82.41	80.72	88.92	94.22	92.29	97.69	100.00
2	Kota	84.95	80.65	93.55	98.92	96.77	100.00	100.00
3	Provinsi	67.65	73.53	88.24	91.18	91.18	100.00	100.00
Total		81.92	80.26	89.67	94.83	92.99	98.23	100.00

Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan, Diolah, 2021

Tabel 1. 9 Perkembangan Pelaksanaan E-Procurement untuk DID Tahun 2018-2021 dan Proyeksinya untuk DID Tahun 2022-2024

		Jumlah Pemerintah Daerah					Proyeksi	
No.	Daerah	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kabupaten	408	406	408	398	403	409	415
2	Kota	93	93	93	93	93	93	93
3	Provinsi	34	34	34	33	34	34	34
Total		535	533	531	524	530	536	542

		Persentase Pemerintah Daerah					Proyeksi	
No.	Daerah	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kabupaten	98.31	97.83	98.31	95.90	97.11	98.55	100.00
2	Kota	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3	Provinsi	100.00	100.00	100.00	97.06	100.00	100.00	100.00
Total		98.71	98.34	97.97	96.68	97.79	98.89	100.00

Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan, Diolah, 2021

Tabel 1.10 Perkembangan Pelaksanaan E-Budgeting untuk DID Tahun 2018-2021 dan Proyeksinya untuk DID Tahun 2022-2024

		Jumlah Pemerintah Daerah				Proyeksi	
No.	Daerah	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kabupaten	410	404	402	406	411	415
2	Kota	93	93	93	93	93	93
3	Provinsi	34	34	34	34	34	34
Total		537	531	529	533	538	542

		Persentase Pemerintah Daerah				Proyeksi	
No.	Daerah	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kabupaten	98.80	97.35	96.87	97.83	99.04	100.00
2	Kota	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3	Provinsi	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Total		99.08	97.97	97.60	98.34	99.26	99.96

Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan, Diolah, 2021

Tabel 1.11 Perkembangan Ketersediaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk DID Tahun 2019-2020

Jumlah Pemerintah Daerah				
No.	Daerah	2019	2020	2021
1	Kabupaten	415	415	415
2	Kota	93	93	93
3	Provinsi	34	34	34
Total		542	542	542

Persentase Pemerintah Daerah				
No.	Daerah	2019	2020	2020
1	Kabupaten	100.00	100.00	100.00
2	Kota	100.00	100.00	100.00
3	Provinsi	100.00	100.00	100.00
Total		100.00	100.00	100.00

Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan, Diolah, 2021



Sumber: Kementerian Investasi/BKPM, 2021

Gambar 1.10 Peraturan BPKM Tahun 2021 terkait Penilaian Kinerja PTSP

D.2 Kategori Kinerja

Dalam PMK No. 167/PMK.07/2020 disebutkan bahwa untuk DID tahun 2021, terdapat 11 kelompok kategori kinerja daerah yang terinci dalam 24 indikator kinerja daerah, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Daerah yang mendapat alokasi DID adalah daerah yang memenuhi kriteria utama dan memenuhi ketentuan antara lain:

- a. paling kurang mendapat nilai baik (B) untuk kelompok kategori:
 1. Kemandirian daerah;
 2. Kualitas belanja modal untuk Pendidikan;
 3. Kualitas belanja modal untuk Kesehatan;
 4. Pelayanan dasar publik bidang pendidikan
 5. Pelayanan dasar publik bidang kesehatan
 6. Pelayanan dasar publik bidang infrastruktur
 7. Penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 8. SAKIP;
 9. Kesejahteraan Masyarakat;
 10. Peningkatan Ekspor;
 11. Peningkatan Investasi; dan
 12. Pencegahan korupsi
- b. mendapatkan penilaian oleh kementerian/lembaga non kementerian untuk kelompok kategori:
 1. Penghargaan Pembangunan Daerah;
 2. Inovasi Daerah;
 3. Pengendalian Inflasi; dan
 4. Pengelolaan Sampah
- c. paling kurang mendapatkan nilai 95 untuk penilaian kategori Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD).

Selanjutnya, berdasarkan pagu alokasi DID ditetapkan alokasi DID menurut daerah provinsi dan kabupaten/kota. Artinya terdapat tiga kluster dalam penetapan dan penghitungan alokasi DID, yaitu provinsi, kabupaten dan kota.

a. Hubungan Antar Kategori Kinerja dan Antar Tahun

Dari 24 kategori kinerja, apabila dikorelasikan antar jenis kategori kinerja, tidak ada satupun jenis kategori kinerja yang memiliki nilai koefisien korelasi yang besar (dengan nilai $\geq 0,75$) dengan jenis kategori kinerja yang lainnya, baik menurut daerah penerima DID maupun besaran penerimaan DID. Hal tersebut menandakan bahwa tidak terjadi hubungan yang kuat (*no-multicollinearity*) antar kategori kinerja, sehingga dapat dinyatakan bahwa kategori-kategori kinerja yang ada untuk DID tahun 2021 secara umum sudah cukup baik.

Tabel 1.12 Koefisien Korelasi Antar Kategori Kinerja Daerah Penerima DID Tahun 2021: Besaran Alokasi DID

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
2	0.179																							
3	0.166	0.141																						
4	-0.094	0.102	0.115																					
5	-0.059	0.036	-0.004	0.081																				
6	0.198	0.167	0.031	-0.038	-0.045																			
7	0.125	0.171	0.086	0.034	0.098	0.123																		
8	-0.065	-0.075	0.101	-0.005	0.000	-0.022	-0.004																	
9	0.112	0.129	-0.036	-0.008	0.066	0.028	0.035	0.063																
10	-0.114	0.013	-0.012	0.039	0.102	-0.065	0.023	0.090	-0.039															
11	0.126	0.023	0.057	0.007	0.069	0.113	0.137	0.009	0.106	-0.001														
12	-0.083	-0.064	0.148	0.117	-0.048	0.016	0.020	0.062	-0.028	0.031	0.050													
13	0.038	-0.047	0.077	0.004	-0.035	0.008	0.092	0.119	0.047	0.015	0.087	0.094												
14	0.288	0.113	0.130	0.006	-0.061	0.089	0.018	0.023	0.182	-0.088	0.093	0.014	0.069											
15	0.048	0.047	0.002	0.062	-0.009	0.022	0.087	0.004	0.118	0.051	0.040	0.074	0.049	0.029										
16	0.221	0.091	0.027	-0.032	-0.041	0.122	0.094	-0.032	0.055	-0.016	0.101	-0.019	0.007	0.167	0.078									
17	0.087	0.079	0.063	0.094	0.053	0.160	0.017	0.008	0.080	0.162	0.081	0.042	-0.015	0.198	0.069	0.113								
18	0.205	0.091	0.055	-0.014	0.027	0.033	0.050	0.070	0.239	0.014	0.031	-0.029	0.057	0.142	0.000	0.084	0.033							
19	0.108	-0.033	0.037	-0.062	0.027	0.153	0.094	0.117	0.034	-0.050	0.048	0.013	0.105	0.031	0.015	0.024	0.068	0.145						
20	0.173	0.175	0.005	0.096	0.022	0.136	0.049	-0.001	0.069	0.075	0.017	-0.033	0.013	0.093	0.080	0.062	0.159	0.152	0.104					
21	0.061	0.061	0.040	0.020	0.039	0.070	0.050	0.024	-0.004	0.142	-0.036	0.013	0.074	0.086	0.025	0.086	0.076	0.093	0.153	0.279				
22	0.035	-0.022	0.068	0.014	-0.034	0.067	0.053	0.018	0.076	-0.027	0.004	0.033	0.118	0.054	0.057	0.026	-0.002	0.039	0.249	0.175	0.202			
23	-0.009	0.032	-0.005	-0.021	0.052	0.026	-0.017	0.019	0.094	0.009	0.035	0.080	0.132	0.022	0.030	-0.012	0.012	0.044	-0.007	0.029	-0.023	0.044		
24	0.059	0.124	0.088	0.036	0.062	0.088	-0.008	0.046	-0.011	0.079	0.065	-0.064	0.017	-0.021	-0.014	-0.032	0.120	0.080	0.063	0.107	0.122	0.215	-0.050	
Min	-0.114	-0.075	-0.036	-0.062	-0.061	-0.065	-0.017	-0.032	-0.039	-0.088	-0.036	-0.064	-0.015	-0.021	-0.014	-0.032	-0.002	0.039	-0.007	0.029	-0.023	0.044	-0.050	
Max	0.288	0.175	0.148	0.117	0.102	0.160	0.137	0.119	0.239	0.162	0.101	0.094	0.132	0.198	0.080	0.113	0.159	0.152	0.249	0.279	0.202	0.215	-0.050	

Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan, Diolah, 2021

Selain hubungan antar kategori kinerja dalam satu waktu (yaitu DID untuk tahun 2021), perlu juga dilihat korelasi menurut kategori kinerja antar tahun, yaitu antara DID tahun 2021 dan DID tahun 2020 sebelumnya. Dari hasil pengolahan koefisien korelasi, diperoleh bahwa semua kategori kinerja cukup baik (dengan nilai $< 0,75$).

Terdapat satu kategori yang juga perlu mendapatkan perhatian karena memiliki koefisien korelasi yang agak tinggi (lebih besar dari 0,5), yaitu untuk kategori Inovasi Daerah. Koefisien korelasi yang agak tinggi tersebut menunjukkan bahwa daerah yang telah mendapatkan alokasi pada kinerja tersebut pada tahun 2020, memiliki peluang yang besar untuk mendapatkan alokasi kembali pada kategori yang bersangkutan pada tahun 2021.



Tabel 1.13 Koefisien Korelasi Antar Kategori Kinerja Daerah Penerima DID Tahun 2021: Daerah Penerima DID

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
2	0.175																							
3	0.161	0.144																						
4	-0.100	0.100	0.100																					
5	-0.058	0.032	-0.009	0.081																				
6	0.198	0.169	0.033	-0.039	-0.047																			
7	0.112	0.175	0.084	0.029	0.103	0.125																		
8	-0.063	-0.073	0.103	-0.013	-0.008	-0.021	0.004																	
9	0.109	0.135	-0.036	-0.011	0.065	0.034	0.034	0.066																
10	-0.110	0.013	-0.016	0.031	0.099	-0.063	0.030	0.087	-0.036															
11	0.125	0.032	0.059	0.004	0.075	0.122	0.140	0.010	0.109	-0.007														
12	-0.083	-0.061	0.145	0.117	-0.043	0.019	0.020	0.056	-0.024	0.034	0.048													
13	0.034	-0.042	0.076	0.005	-0.036	0.013	0.081	0.117	0.050	0.008	0.077	0.093												
14	0.292	0.111	0.137	0.004	-0.058	0.087	0.010	0.025	0.179	-0.086	0.108	0.005	0.077											
15	0.052	0.044	-0.004	0.069	-0.003	0.026	0.089	0.012	0.124	0.044	0.046	0.061	0.047	0.031										
16	0.212	0.089	0.022	-0.029	-0.039	0.123	0.078	-0.034	0.047	-0.011	0.104	-0.019	-0.002	0.165	0.082									
17	0.082	0.076	0.060	0.096	0.054	0.161	0.017	-0.001	0.073	0.169	0.084	0.046	-0.021	0.197	0.074	0.103								
18	0.202	0.105	0.062	-0.016	0.017	0.039	0.051	0.070	0.221	0.020	0.029	-0.027	0.060	0.144	0.003	0.083	0.017							
19	0.100	-0.031	0.038	-0.064	0.037	0.146	0.097	0.116	0.032	-0.054	0.051	0.012	0.106	0.030	0.018	0.024	0.058	0.141						
20	0.164	0.172	0.003	0.105	0.029	0.129	0.050	-0.002	0.070	0.075	0.022	-0.031	0.007	0.088	0.082	0.062	0.150	0.156	0.100					
21	0.052	0.058	0.037	0.021	0.052	0.064	0.048	0.020	-0.010	0.143	-0.033	0.017	0.081	0.082	0.023	0.079	0.082	0.087	0.138	0.257				
22	0.024	-0.008	0.068	0.013	-0.031	0.068	0.050	0.020	0.072	-0.027	-0.004	0.037	0.122	0.048	0.066	0.031	-0.008	0.037	0.234	0.158	0.173			
23	-0.011	0.033	-0.005	-0.021	0.043	0.019	-0.019	0.022	0.096	0.014	0.034	0.082	0.126	0.016	0.026	-0.011	0.015	0.039	-0.008	0.032	-0.020	0.043		
24	0.045	0.110	0.080	0.037	0.060	0.072	-0.017	0.038	-0.001	0.080	0.053	-0.065	0.011	-0.002	-0.028	-0.025	0.131	0.090	0.055	0.114	0.132	0.191	-0.051	
Min	-0.110	-0.073	-0.036	-0.064	-0.058	-0.063	-0.019	-0.034	-0.036	-0.086	-0.033	-0.065	-0.021	-0.002	-0.028	-0.025	-0.008	0.037	-0.008	0.032	-0.020	0.043	-0.051	
Max	0.292	0.175	0.145	0.117	0.103	0.161	0.140	0.117	0.221	0.169	0.108	0.093	0.126	0.197	0.082	0.103	0.150	0.156	0.234	0.257	0.173	0.191	-0.051	

Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan, Diolah, 2021

**Tabel 1.14 Koefisien Korelasi Menurut Kategori Kinerja Daerah Penerima DID
Antar Tahun 2020 dan 2021: Daerah Penerima DID**

No.	Kategori Kinerja	Koefisien Korelasi
1	Peningkatan Ekspor	0.3901
2	Peningkatan Investasi	-0.0071
3	Kemandirian Daerah	0.1967
4	Kualitas Belanja Modal Kesehatan	-0.0655
5	Kualitas Belanja Modal Pendidikan	0.0425
6	Persentase Penduduk Miskin	0.1192
7	IPM	0.1474
9	Angka Partisipasi Murni	0.1532
10	Peta Mutu Pendidikan	-0.0746
11	Penanganan <i>Stunting</i>	-0.0647
12	Persentase Balita Sudah Mendapatkan Imunisasi Lengkap	-0.0164
13	Persentase Cakupan Persalinan di Fasilitas Kesehatan	0.1699
14	Persentase rumah tangga dengan sumber air minum layak	-0.0642
15	Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak	-0.0060
16	EKPPD	0.0498
17	SAKIP	0.2139
19	Penghargaan Pembangunan Daerah	0.2899
20	Inovasi Daerah	0.5556
21	Inovasi Pelayanan Publik	0.2923
24	Pengelolaan Sampah	0.4526
Total Penerima DID		0.5435

Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan, Diolah, 2021

b. Ke-up to date-an, Ketersediaan dan Kestabilan Data yang Digunakan

Setidaknya terdapat 3 klasifikasi sumber data yang digunakan untuk penghitungan DID tahun 2021, yaitu (i) data terkait keuangan daerah yang bersumber dari BPK, DJPK Kementerian Keuangan dan Pemerintah Daerah, (ii) data yang terkait kategori kinerja pelayanan dasar publik dan kategori kesejahteraan masyarakat yang bersumber dari BPS (diolah dari Survey Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas), dan (iii) data yang berasal dari Kementerian/Lembaga terkait dengan pelayanan umum pemerintahan.

Data yang relatif kurang *up to date* dari ketiga klasifikasi tersebut dalam penghitungan DID tahun 2021 adalah data-data yang terkait kategori kinerja pelayanan dasar publik dan kategori kesejahteraan masyarakat yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Mengingat sumber data yang dilakukan melalui Susenas (yang dilakukan 2 kali dalam setahun, yaitu Bulan Maret dan September), dan juga waktu penetapan dan penghitungan alokasi DID yang baru diumumkan paling cepat akhir Oktober pada tahun yang bersangkutan, sebenarnya ada potensi untuk menggunakan data yang lebih *up to date*.

Walaupun penilaian dilakukan oleh K/L, namun ketersediaan data dasar untuk semua daerah tetap menjadi penting, seperti EKPPD, Pengelolaan Sampah, Indeks Inovasi Daerah, dan Indeks Pencegahan Korupsi. Hal ini perlu diperhatikan.

Tabel 1.15 Waktu (Tahun) dan Sumber Data untuk DID Tahun 2021



No	Jenis Data Kriteria Utama	Tahun	Sumber Data
1	Opini BPK atas LKPD	2019	BPK
2	Penetapan Perda APBD	2020	PEMDA
3	e-budgeting	2020	KEMENDAGRI
4	e-procurement	2019	LKPP

No	Jenis Data Kategori Kinerja	Tahun	Sumber Data
I. Kategori Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah			
1	APBD (Anggaran)	2018-2019	PEMDA
2	Realisasi APBD	2018-2019	PEMDA
3	PDRB Non Migas	2018-2019	BPS
4	SIKD	2020	KEMENKEU
II. Kategori Pelayanan Dasar Publik Bidang Pendidikan			
1	Peta Mutu Pendidikan	2018-2019	KEMENDIKBUD
2	Angka Partisipasi Murni	2018-2019	BPS
III. Kategori Pelayanan Dasar Publik Bidang Kesehatan			
1	Persentase Baduta <i>Stunting</i>	2018-2019	KEMENKES
2	Persentase Balita Sudah Mendapatkan Imunisasi Lengkap	2018-2019	KEMENKES
3	Persentase Cakupan Persalinan dengan Tenaga Kesehatan	2018-2019	BPS
IV. Kategori Pelayanan Dasar Publik Bidang Infrastruktur			
1	Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Layak	2018-2019	BPS
2	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	2018-2019	BPS
V. Kategori Kesejahteraan Masyarakat			
1	Persentase Penduduk Miskin	2018-2019	BPS
2	Indeks Pembangunan Manusia	2018-2019	BPS

No	Jenis Data Kategori Kinerja	Tahun	Sumber Data
3	Penurunan Angka Pengangguran	2018-2019	BPS
VI. Pelayanan Umum Pemerintahan			
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2018-2019	KEMENDAGRI
2	Penghargaan Pembangunan Daerah	2020	BAPPENAS
3	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	2018-2019	KEMENPANRB
4	Inovasi Daerah	2020	KEMENPANRB/ KEMENDAGRI
VII. Peningkatan Ekspor		2018-2019	KEMENKEU
VIII. Peningkatan Investasi		2018-2019	BKPM
IX. Kategori Pengelolaan Sampah		2020	KLHK
X. TPID Award		2020	MENKO PEREKONOMIAN
XI. Indeks Pencegahan Korupsi		2018-2019	KPK

Sumber: DJPK Kementerian Keuangan, 2021

c. Penambahan/Pengurangan Kategori dan Indikator Kinerja

Seiring dengan berjalannya waktu, beberapa kategori dan indikator kinerja seharusnya mengalami perbaikan di berbagai daerah. Mungkin saja terdapat beberapa kategori dan indikator kinerja yang sudah tidak relevan lagi karena sudah menunjukkan kinerja yang baik, dan mungkin saja terdapat beberapa kategori kinerja baru yang diusulkan/diaspirasikan oleh berbagai pihak untuk menjadi kategori kinerja tersendiri dalam penghitungan alokasi DID untuk tahun 2022 seiring dengan perkembangan terbaru, misalnya terkait dengan prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Kondisi terjadinya wabah pandemi COVID-19 juga menyebabkan berbagai kebijakan, terutama terkait dengan keuangan negara dan TKDD juga mengalami penyesuaian.

Tentunya penambahan atau pengurangan kategori dan indikator kinerja membutuhkan pertimbangan atas prasyarat berupa ketersediaan data yang objektif dan *up to date* serta kontinyu untuk seluruh daerah di Indonesia yang dikeluarkan oleh pihak lembaga/institusi yang berwenang. Hal tersebut sesuai dengan prinsip dari penghitungan alokasi DID, dimana kategori dan indikator kinerja dari pemerintah daerah perlu:

- i. Keadilan (*fairness*), setiap daerah memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh DID.
- ii. Dapat diperbandingkan, dilaksanakan dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja dan indikator yang sama untuk setiap daerah.
- iii. Objektif, dilaksanakan dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja yang baku dan tidak menimbulkan penafsiran ganda.
- iv. Terukur, dilaksanakan dengan menggunakan data kuantitatif dan/atau kualitatif

yang dapat dikuantitatifkan dan menggunakan alat ukur kuantitatif sehingga hasilnya dapat disajikan secara kuantitatif.

- v. Berkesinambungan, dilaksanakan setiap tahun untuk memperoleh hasil monitoring dan evaluasi kinerja Pemerintahan Daerah dari waktu ke waktu.
- vi. Akuntabel, dilaksanakan dengan pengolahan data indikator yang diperoleh dari lembaga statistik pemerintah dan/atau kementerian/lembaga teknis yang berwenang menerbitkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Beberapa indikator tambahan yang diusulkan secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.16 Berbagai Usulan uang Masuk untuk Indikator dalam DID Tahun 2022

No.	Indikator	Sumber Data	Keterangan
1	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	Kemensos/ Bappenas	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mendorong perbaikan pelayanan dasar publik yang lebih berkualitas, penurunan kesenjangan antar daerah, pengentasan kemiskinan maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mendorong Reformasi Sistem Perlindungan Sosial. ➤ Menggunakan data DTKS (Sistem Aplikasi SEPAKAT) dengan alternatif indikator Akurasi Ketepatan Sasaran Program Perlindungan Sosial dan/atau Performa Pemutakhiran Data Kemiskinan
2	Kinerja PTSP di Daerah	BKPM	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Telah tersedia PTSP di 542 Pemerintah Daerah, sehingga penilaian dilakukan terhadap kualitas PTSP. ➤ Tidak dilakukan penilaian pada tahun 2020 ➤ Adanya peraturan kepala BKPM no 8 tahun 2020 tentang Penilaian kinerja pelayanan terpadu satu pintu dan kinerja percepatan pelaksanaan berusaha pemerintah daerah serta kinerja percepatan pelaksanaan berusaha kementerian negara/Lembaga
3	Indeks Daya Saing Daerah	Ristekdikti	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mendorong perbaikan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan seluruh potensi yang dimilikinya melalui peningkatan produktifitas, nilai tambah dan persaingan ➤ Untuk menilai keberhasilan suatu daerah untuk dapat bersaing dengan daerah lain dan mendukung daya saing nasional
4	Indeks Lingkungan Hidup	KLHK	Perbaikan proses penetapan dan variabel penilaian dari kuantitas dan kualitas pengelolaan sampah.
5	Kawasan konservasi	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Penghargaan ke Provinsi yang berhasil meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi

Sumber: DJPK Kementerian Keuangan, 2021

Sebelum adanya penambahan dan/atau pengurangan kategori dan indikator kinerja, ada baiknya dilakukan *review* terlebih dahulu terhadap setiap kategori dan indikator kinerja yang digunakan untuk DID tahun 2021.

1. Kelompok Kategori Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah

i) Kategori Kemandirian Daerah

Kategori kinerja kemandirian daerah dalam DID tahun 2021 didasarkan pada pajak daerah, retribusi daerah, dan/atau produk domestik regional bruto (PDRB). Bila melihat data indikator Rasio Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) per PDRB Non Migas Harga Belaku (dalam persen) tahun 2018, 2019 dan perubahannya, menunjukkan bahwa kemandirian daerah, baik provinsi, kabupaten maupun kota masih rendah, bervariasi antar daerah, dan belum stabil perubahannya. Kategori ini tentunya masih layak untuk dipertahankan dalam DID tahun 2022.

Namun, yang menjadi catatan khusus adalah penggunaan data PDRB Non Migas (secara total) sebagai basis PDRD. Berdasarkan hasil studi DJPK Kementerian Keuangan (2018), pajak daerah dan retribusi daerah memiliki nilai koefisien korelasi yang tertinggi dengan PDRB Non Migas untuk Sektor 6 (Konstruksi) sampai dengan Sektor 17 (Jasa Lainnya) (lihat Tabel 19 dan Tabel 20). Artinya, PDRB Non Migas untuk Sektor 6 (Konstruksi) sampai dengan Sektor 17 (Jasa Lainnya) dapat menjadi alternatif basis PDRD dan juga pengganti dari PDRB Non Migas dalam penghitungan kategori kinerja kemandirian daerah.

Tabel 1.17 Statistik Deskriptif Rasio PDRD per PDRB Non Migas Harga Berlaku untuk DID Tahun 2020 (Persen)

Daerah	Semua Daerah			Daerah Penerima DID			
	Kabupaten	2018	2019	Delta	2018	2019	Delta
Maksimum		6.94	6.95	1.37	6.94	6.95	1.37
Minimum		0.00	0.00	-0.92	0.17	0.38	0.02
Rata-rata		0.40	0.43	0.03	0.77	0.96	0.19
St. Deviasi		0.45	0.49	0.16	0.95	1.01	0.27
Koefisien Variasi		1.13	1.15	6.13	1.23	1.05	1.42
Kota	2018	2019	Delta	2018	2019	Delta	
Maksimum	2.00	1.99	0.19	1.82	1.93	0.13	
Minimum	0.09	0.09	-0.37	0.55	0.65	0.02	
Rata-rata	0.70	0.70	0.00	1.03	1.10	0.07	
St. Deviasi	0.37	0.36	0.08	0.35	0.35	0.04	
Koefisien Variasi	0.52	0.52	1578.98	0.34	0.32	0.51	

Provinsi	2018	2019	Delta	2018	2019	Delta
Maksimum	1.67	1.56	0.38	1.40	1.38	0.04
Minimum	0.41	0.45	-0.16	0.96	1.00	-0.01
Rata-rata	0.89	0.88	-0.01	1.10	1.12	0.02
St. Deviasi	0.28	0.26	0.09	0.20	0.18	0.02
Koefisien Variasi	0.32	0.29	-6.95	0.19	0.16	1.11

Sumber: DJPK Kementerian Keuangan, 2021

Tabel 1.18 Korelasi Pajak Daerah dan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2016

	2014	2015	2016
PDRB	0.9353	0.9441	0.9386
PDRBMIG	0.9353	0.9441	0.9386
PDRBNONMIG	0.9487	0.9534	0.9474
PDRBNON23	0.9680	0.9749	0.9706
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.5256	0.5302	0.5117
2. Pertambangan dan Penggalian	0.2455	0.2198	0.2052
3. Industri Pengolahan	0.7644	0.7740	0.7663
4. Pengadaan Listrik dan Gas	0.6361	0.6135	0.6438
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.7778	0.7720	0.7561
6. Konstruksi	0.9603	0.9643	0.9569
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0.9370	0.9405	0.9310
8. Transportasi dan Pergudangan	0.8767	0.8735	0.8764
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.8683	0.8775	0.8581
10. Informasi dan Komunikasi	0.9528	0.9627	0.9643
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	0.9346	0.9387	0.9462
12. Real Estat	0.9114	0.9166	0.9191
13. Jasa Perusahaan	0.8312	0.8367	0.8448
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0.9649	0.9685	0.9660
15. Jasa Pendidikan	0.9705	0.9795	0.9806
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.9623	0.9690	0.9703
17. Jasa lainnya	0.9715	0.9769	0.9811
SEKTOR6SD17	0.9783	0.9850	0.9831

Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan, 2018

Tabel 1.19 Korelasi Retribusi Daerah dan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2016

	2014	2015	2016
PDRB	0.1932	0.5745	0.6644
PDRBMIG	0.1932	0.5745	0.6644
PDRBNONMIG	0.2007	0.5869	0.6781
PDRBNON23	0.2154	0.6186	0.7301
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.0555	0.2020	0.1708
2. Pertambangan dan Penggalian	0.0060	0.0530	0.0501
3. Industri Pengolahan	0.1430	0.4397	0.4685
4. Pengadaan Listrik dan Gas	0.1310	0.3890	0.4659
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.1696	0.5517	0.5172
6. Konstruksi	0.2180	0.6163	0.7311
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0.2100	0.6279	0.6896
8. Transportasi dan Pergudangan	0.1759	0.5348	0.5996
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.2291	0.7147	0.7380
10. Informasi dan Komunikasi	0.2324	0.6436	0.7865
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	0.2343	0.6227	0.8097
12. Real Estat	0.2292	0.6120	0.7920
13. Jasa Perusahaan	0.2227	0.5665	0.7791
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0.2160	0.5775	0.7531
15. Jasa Pendidikan	0.2162	0.5990	0.7602
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.2275	0.6092	0.7738
17. Jasa lainnya	0.2224	0.5954	0.7714
SEKTOR6SD17	0.2292	0.6493	0.7775

Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan, 2018

ii) Kategori Kualitas Belanja Modal Non Kantor untuk Pendidikan

Kategori kualitas belanja modal untuk pendidikan diukur melalui rasio atau persentase belanja modal pendidikan non-kantor terhadap total belanja pendidikan. Daerah penerima DID untuk kategori ini adalah daerah yang memiliki rasio belanja modal pendidikan non kantor terhadap total belanja pendidikan relatif tinggi capaian akhirnya pada 2019 dan perubahannya dari 2018 juga cukup tinggi. Indikator ini sebenarnya kurang mencerminkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, dikarenakan untuk belanja modal atau lainnya sangat tergantung dari prioritas dan kebutuhan daerah, khususnya terkait dengan bidang Pendidikan.

Tabel 1.20 Statistik Deskriptif Belanja Modal Pendidikan Non-Kantor Terhadap Belanja Pendidikan untuk DID Tahun 2021 (Persen)

Daerah	Semua Daerah			Daerah Penerima DID		
Kabupaten	2018	2019	Delta	2018	2019	Delta
Maksimum	53.03	63.03	23.19	53.03	63.03	23.19
Minimum	0.04	1.50	-15.80	0.66	11.25	2.97
Rata-rata	9.50	12.23	2.73	9.69	18.59	8.90
St. Deviasi	6.58	6.92	4.95	6.80	7.13	3.78
Koefisien Variasi	0.69	0.57	1.81	0.70	0.38	0.43

Kota	2018	2019	Delta	2018	2019	Delta
Maksimum	33.51	27.31	18.99	16.41	27.31	18.99
Minimum	0.58	1.90	-14.63	3.37	12.24	1.95
Rata-rata	9.44	11.56	2.12	9.55	17.47	7.92
St. Deviasi	5.33	5.14	4.77	3.96	3.93	4.00
Koefisien Variasi	0.57	0.44	2.25	0.41	0.23	0.50

Provinsi	2018	2019	Delta	2018	2019	Delta
Maksimum	34.06	29.11	11.54	15.48	21.52	11.54
Minimum	3.52	4.06	-5.09	6.84	12.65	1.48
Rata-rata	10.41	11.22	0.81	10.66	16.34	5.68
St. Deviasi	5.76	5.37	3.61	3.71	3.87	3.77
Koefisien Variasi	0.55	0.48	4.45	0.35	0.24	0.66

Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan, Diolah, 2021

iii) Kategori Kualitas Belanja Modal untuk Kesehatan

Hampir sama dengan kualitas belanja modal untuk pendidikan, kualitas belanja modal untuk kesehatan diukur melalui rasio atau persentase belanja modal kesehatan non-kantor terhadap total belanja kesehatan. Dengan melihat statistik deskriptif yang ada, indikator ini juga menunjukkan kinerja yang relatif lebih baik dibandingkan dengan kualitas belanja modal untuk pendidikan. Untuk DID tahun 2022, hal yang sama dengan belanja modal non kantor untuk Pendidikan, indikator ini juga kurang mencerminkan kualitas dari pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, perlu dicarikan indikator baru yang lebih baik ke depan.

Tabel 1.21 Statistik Deskriptif Belanja Modal Kesehatan untuk DID Tahun 2021 (Persen)

Daerah	Semua Daerah			Daerah Penerima DID		
Kabupaten	2018	2019	Delta	2018	2019	Delta
Maksimum	74.52	69.87	60.14	50.32	65.49	60.14
Minimum	0.00	2.34	-42.34	3.17	18.91	2.24
Rata-rata	19.11	18.43	-0.68	17.29	29.89	12.60
St. Deviasi	11.34	10.41	10.84	8.57	10.46	9.07
Koefisien Variasi	0.59	0.56	-15.83	0.50	0.35	0.72

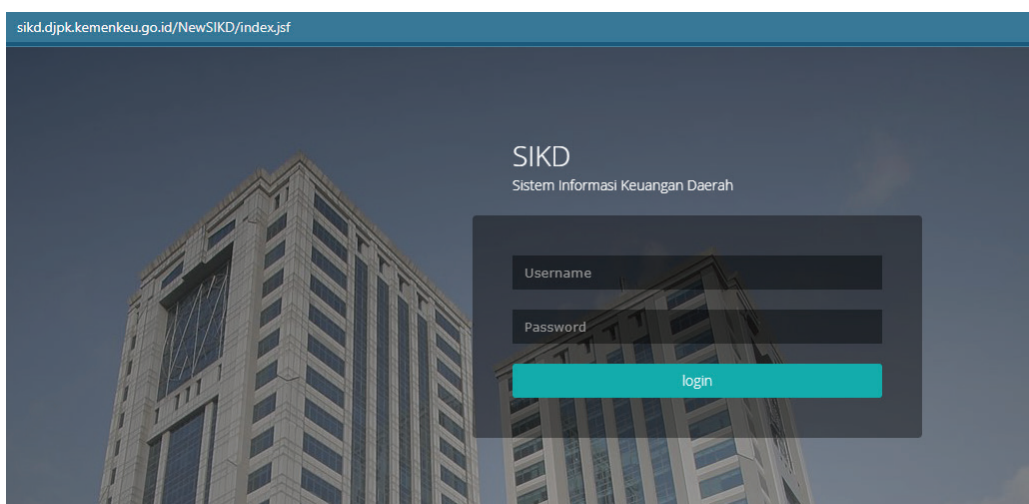
Kota	2018	2019	Delta	2018	2019	Delta
Maksimum	42.03	43.80	28.94	27.40	43.80	28.94
Minimum	2.66	2.15	-21.42	2.66	15.59	5.04
Rata-rata	15.35	16.47	1.12	13.71	26.26	12.55
St. Deviasi	8.47	7.83	8.91	7.05	7.42	5.91
Koefisien Variasi	0.55	0.48	7.94	0.51	0.28	0.47

Provinsi	2018	2019	Delta	2018	2019	Delta
Maksimum	60.08	62.73	20.69	27.57	37.15	16.82
Minimum	3.27	1.20	-47.64	12.27	22.31	5.00
Rata-rata	22.33	19.23	-3.09	20.22	30.28	10.06
St. Deviasi	11.81	11.86	13.21	5.82	5.71	3.92
Koefisien Variasi	0.53	0.62	-4.27	0.29	0.19	0.39

Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan, Diolah, 2021

iv) Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)

Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) merupakan indikator yang baru ditambahkan dalam indikator DID tahun 2021. Penerapan indikator ini bertujuan untuk mendorong kinerja Pemda untuk melakukan pelaporan transaksi harian secara real-time. Penilaian dilakukan berdasarkan interkoneksi SIKD yang meliputi antara lain registrasi, status koneksi agen SIKD dan penyampaian data. Berdasarkan data dari DJPK Kementerian Keuangan (2021), masih banyak Pemerintah Daerah baik Provinsi, Kabupaten, maupun Kota yang nilainya belum mencapai 95 persen. Oleh karena itu, indikator SIKD ini dapat tetap diberlakukan untuk DID tahun 2022 ke depan.



Sumber: DJPK Kementerian Keuangan, 2021

Gambar 1.11 Aplikasi SIKD

2. Kelompok Kategori Pelayanan Dasar Publik Bidang Pendidikan

i) Kategori Peta Mutu Pendidikan (PMP) Sekolah Menengah

Peta mutu pendidikan (PMP) disusun dengan berdasarkan penerapan standar nasional pendidikan (SNP), dimana datanya berasal dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Dalam penilaian PMP, skor tertinggi adalah 7, dimana belum ada daerah yang mampu mencapainya. Secara umum, PMP mengalami peningkatan, baik nilai maksimum, minimum, maupun rata-rata. Namun, terdapat juga daerah yang mengalami penurunan, yaitu di daerah Kabupaten. Dengan melihat variasi dan perkembangan data yang ada, indikator ini tetap dapat digunakan untuk DID tahun 2022.

Tabel 1.22 Statistik Deskriptif Peta Mutu Pendidikan Sekolah Menengah untuk DID Tahun 2021

Daerah	Semua Daerah			Daerah Penerima DID			
	Kabupaten	2018	2019	Delta	2018	2019	Delta
Maksimum		5.75	6.40	1.64	5.51	6.40	1.37
Minimum		0.00	0.00	-5.26	5.02	6.28	0.85
Rata-rata		5.38	6.19	0.81	5.35	6.34	0.99
St. Deviasi		0.32	0.76	0.65	0.11	0.03	0.10
Koefisien Variasi		0.06	0.12	0.81	0.02	0.00	0.10
Kota		2018	2019	Delta	2018	2019	Delta

Maksimum	5.80	6.43	1.06	5.59	6.42	0.96
Minimum	5.24	6.15	0.55	5.45	6.33	0.82
Rata-rata	5.52	6.32	0.80	5.51	6.37	0.86
St. Deviasi	0.09	0.05	0.08	0.04	0.03	0.03
Koefisien Variasi	0.02	0.01	0.10	0.01	0.00	0.04

Provinsi	2018	2019	Delta	2018	2019	Delta
Maksimum	5.62	6.39	1.18	5.57	6.39	0.95
Minimum	5.13	6.25	0.70	5.41	6.35	0.81
Rata-rata	5.50	6.33	0.82	5.49	6.37	0.88
St. Deviasi	0.09	0.03	0.09	0.06	0.02	0.05
Koefisien Variasi	0.02	0.01	0.11	0.01	0.00	0.06

Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan, Diolah, 2021

ii) Kategori Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah

Angka partisipasi murni (APM) untuk kabupaten/kota adalah APM SMP dan untuk provinsi adalah APM SMA/SMK. Apabila dilihat secara umum, nilai rata-rata APM memang meningkat, namun masih terdapat beberapa daerah yang menurun, khususnya di Kabupaten dan Kota. Dengan melihat variasi dan perkembangan data yang ada, yang belum optimal, indikator APM Sekolah Menengah asih dapat digunakan dalam alokasi DID tahun 2022.

Tabel 1.23 Statistik Deskriptif Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah untuk DID Tahun 2021

Daerah	Semua Daerah			Daerah Penerima DID			
	Kabupaten	2018	2019	Delta	2018	2019	Delta
Maksimum		97.41	97.29	6.06	92.16	93.65	4.91
Minimum		14.58	16.05	-4.66	73.41	77.67	0.46
Rata-rata		76.03	76.68	0.65	83.26	85.36	2.10
St. Deviasi		10.66	10.35	1.39	4.78	4.06	1.13
Koefisien Variasi		0.14	0.14	2.12	0.06	0.05	0.54

Kota	2018	2019	Delta	2018	2019	Delta
Maksimum	96.96	96.91	3.76	92.32	92.64	3.45
Minimum	64.24	64.90	-1.45	78.53	81.31	0.32
Rata-rata	80.17	80.70	0.53	84.56	86.26	1.70

St. Deviasi	7.03	6.60	1.26	3.72	3.01	0.94
Koefisien Variasi	0.09	0.08	2.39	0.04	0.03	0.55

Provinsi	2018	2019	Delta	2018	2019	Delta
Maksimum	73.00	73.01	1.05	70.22	70.49	1.05
Minimum	44.31	44.32	0.00	63.68	64.23	0.27
Rata-rata	61.74	61.92	0.18	65.91	66.39	0.48
St. Deviasi	6.09	6.14	0.21	2.54	2.58	0.30
Koefisien Variasi	0.10	0.10	1.18	0.04	0.04	0.62

Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan, Diolah, 2021

3. Kelompok Kategori Pelayanan Dasar Publik Bidang Kesehatan

i) Kategori Penanganan *Stunting* Balita

Kategori penurunan *stunting* balita dinilai dengan menggunakan data dari Kementerian Kesehatan. Secara umum, rata-rata *stunting* mengalami penurunan, terutama untuk daerah penerima DID. Permasalahan utama terkait dengan penanganan *stunting* balita adalah terkait dengan ketersediaan data yang rutin untuk tiap tahun. Bila datanya tersedia dan stabil ke depan, maka indikator ini layak untuk tetap diberlakukan untuk DID tahun 2022, dan juga sebaliknya, jika datanya tidak tersedia dengan cukup baik dan lengkap, maka sebaiknya indikator ini tidak diberlakukan lagi ke depan.

Tabel 1.24 Statistik Deskriptif Penangan *Stunting* Balita untuk DID Tahun 2021 (Persen)

Daerah	Semua Daerah			Daerah Penerima DID			
	Kabupaten	2018	2019	Delta	2018	2019	Delta
Maksimum		0.61	0.66	0.28	0.46	0.29	-0.05
Minimum		0.12	0.03	-0.47	0.12	0.06	-0.27
Rata-rata		0.33	0.31	-0.03	0.33	0.20	-0.13
St. Deviasi		0.08	0.09	0.09	0.07	0.06	0.05
Koefisien Variasi		0.23	0.31	-3.05	0.21	0.27	-0.39

Kota	2018	2019	Delta	2018	2019	Delta
Maksimum	0.50	0.42	0.13	0.40	0.20	-0.05
Minimum	0.13	0.08	-0.24	0.17	0.08	-0.24
Rata-rata	0.26	0.24	-0.02	0.28	0.15	-0.12

St. Deviasi	0.06	0.07	0.08	0.06	0.03	0.05
Koefisien Variasi	0.25	0.29	-3.30	0.23	0.20	-0.43

Provinsi	2018	2019	Delta	2018	2019	Delta
Maksimum	0.43	0.44	0.04	0.33	0.27	-0.03
Minimum	0.18	0.14	-0.09	0.22	0.14	-0.09
Rata-rata	0.30	0.28	-0.02	0.27	0.21	-0.06
St. Deviasi	0.05	0.06	0.03	0.04	0.05	0.02
Koefisien Variasi	0.18	0.23	-1.26	0.16	0.22	-0.33

Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan, Diolah, 2021

ii) Kategori Balita yang Mendapatkan Imunisasi Lengkap

Kategori balita yang mendapatkan imunisasi lengkap dilakukan penilaian berdasarkan data tahun 2018 dan 2019. Secara rata-rata seluruh daerah, persentase balita yang mendapatkan imunisasi lengkap mengalami penurunan dari tahun 2018 ke 2019, termasuk terdapat Kabupaten penerima DID yang mengalami penurunan. Dengan melihat variasi dan perkembangan data yang ada, tentunya kategori ini masih tetap layak untuk dipertahankan untuk alokasi DID tahun 2022.

Tabel 1.25 Statistik Deskriptif Balita yang Mendapatkan Imunisasi Lengkap untuk DID Tahun 2021 (Persen)

Daerah	Semua Daerah			Daerah Penerima DID		
Kabupaten	2018	2019	Delta	2018	2019	Delta
Maksimum	97.00	80.24	55.39	74.70	76.27	49.08
Minimum	0.00	0.00	-65.60	3.30	46.30	-0.05
Rata-rata	45.01	44.68	-0.33	46.74	61.27	14.53
St. Deviasi	22.08	17.16	14.73	17.36	7.97	10.87
Koefisien Variasi	0.49	0.38	-44.95	0.37	0.13	0.75

Kota	2018	2019	Delta	2018	2019	Delta
Maksimum	98.50	81.88	38.36	71.60	77.59	38.36
Minimum	2.90	9.84	-33.94	30.50	57.75	4.73
Rata-rata	52.03	51.58	-0.45	52.32	67.17	14.86

St. Deviasi	19.52	14.28	14.80	12.04	6.08	9.99
Koefisien Variasi	0.38	0.28	-33.10	0.23	0.09	0.67

Provinsi	2018	2019	Delta	2018	2019	Delta
Maksimum	80.80	64.79	13.59	46.40	58.95	12.55
Minimum	19.60	20.18	-16.22	39.40	50.62	6.68
Rata-rata	48.65	47.13	-1.53	43.97	54.11	10.15
St. Deviasi	16.11	10.68	8.37	3.96	4.32	3.08
Koefisien Variasi	0.33	0.23	-5.48	0.09	0.08	0.30

Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan, Diolah, 2021

iii) Kategori Persalinan di Fasilitas Kesehatan

Terkait dengan persalinan di fasilitas kesehatan, rata-rata persalinan di fasilitas kesehatan meningkat, namun terdapat juga daerah yang justru mengalami penurunan, baik provinsi, kabupaten maupun kota. Untuk daerah penerima DID tahun 2021, tidak ada satupun daerah yang mengalami penurunan. Hal yang sama seperti sebelumnya, dengan melihat kondisi variasi dan perkembangan data, kategori ini tetap layak dipertahankan dalam penghitungan DID tahun 2022.

Tabel 1.26 Statistik Deskriptif Persalinan di Fasilitas Kesehatan untuk DID Tahun 2021 (Persen)

Daerah	Semua Daerah			Daerah Penerima DID			
	Kabupaten	2018	2019	Delta	2018	2019	Delta
Maksimum		100.00	100.00	51.73	100.00	100.00	44.73
Minimum		2.30	4.31	-29.09	43.78	81.14	0.00
Rata-rata		69.58	75.39	5.80	84.82	95.55	10.73
St. Deviasi		25.12	21.94	10.65	17.32	6.17	11.91
Koefisien Variasi		0.36	0.29	1.84	0.20	0.06	1.11

Kota	2018	2019	Delta	2018	2019	Delta
Maksimum	100.00	100.00	24.06	100.00	100.00	13.77
Minimum	52.59	50.47	-18.01	85.36	98.46	0.00
Rata-rata	92.40	93.58	1.18	97.43	99.87	2.43

St. Deviasi	10.43	9.38	6.37	3.52	0.37	3.26
Koefisien Variasi	0.11	0.10	5.40	0.04	0.00	1.34

Provinsi	2018	2019	Delta	2018	2019	Delta
Maksimum	99.87	99.84	16.48	84.29	90.25	5.95
Minimum	33.91	39.74	-0.02	84.29	90.25	5.95
Rata-rata	76.18	80.73	4.54	84.29	90.25	5.95
St. Deviasi	17.25	14.57	3.54			
Koefisien Variasi	0.23	0.18	0.78			

Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan, Diolah, 2021

4. Kategori Kelompok Pelayanan Dasar Publik Bidang Infrastruktur

i) Kategori Sumber Air Minum Layak

Secara umum, rata-rata kondisi sumber air minum layak meningkat, namun terdapat juga daerah yang justru mengalami penurunan. Untuk daerah penerima DID tahun 2021, tidak ada satupun daerah yang mengalami penurunan. Dengan melihat kondisi variasi dan perkembangan data, kategori ini juga tetap layak dipertahankan dalam penghitungan DID tahun 2022.

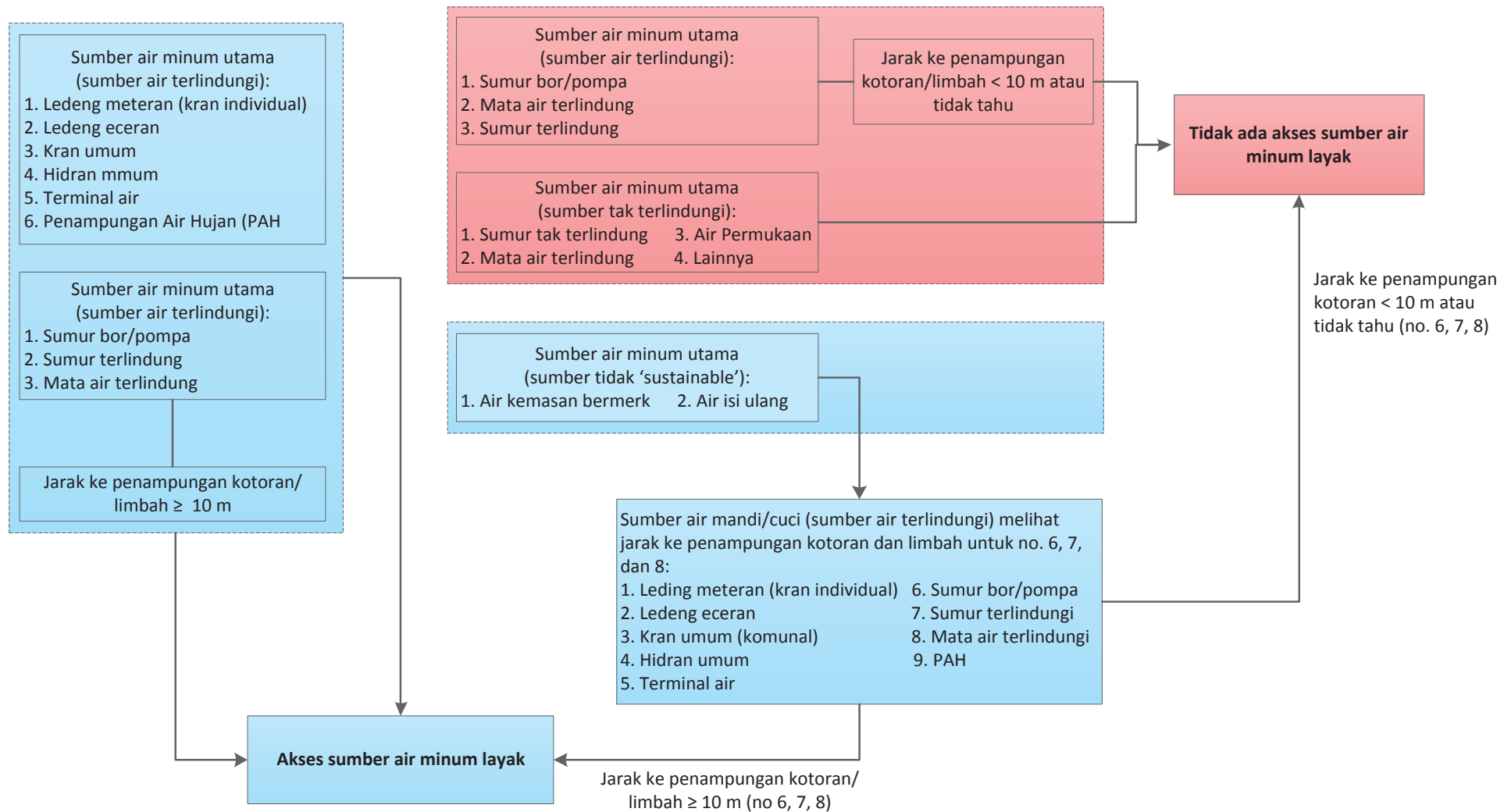
Tabel 1.27 Statistik Deskriptif Sumber Air Minum Layak untuk DID Tahun 2021 (Persen)

Daerah	Semua Daerah			Daerah Penerima DID			
	Kabupaten	2018	2019	Delta	2018	2019	Delta
Maksimum		98.79	100.00	48.05	86.80	100.00	48.05
Minimum		1.50	1.06	-32.71	46.21	84.08	13.00
Rata-rata		66.42	79.69	13.27	70.17	94.57	24.40
St. Deviasi		16.17	17.63	11.24	8.60	3.61	6.51
Koefisien Variasi		0.24	0.22	0.85	0.12	0.04	0.27

Kota	2018	2019	Delta	2018	2019	Delta
	Maksimum	99.50	100.00	38.75	90.18	100.00
Minimum	34.03	45.51	-22.56	68.78	97.60	9.82
Rata-rata	85.61	94.81	9.20	80.97	99.32	18.35
St. Deviasi	10.92	9.44	8.94	6.04	0.69	5.82
Koefisien Variasi	0.13	0.10	0.97	0.07	0.01	0.32

Provinsi	2018	2019	Delta	2018	2019	Delta
	Maksimum	90.90	99.82	21.24	80.62	94.94
Minimum	49.37	57.60	-0.40	71.06	91.64	14.32
Rata-rata	72.95	84.23	11.28	75.78	93.60	17.82
St. Deviasi	9.25	10.12	5.75	3.55	1.19	2.73
Koefisien Variasi	0.13	0.12	0.51	0.05	0.01	0.15

Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan, Diolah, 2021



Gambar 1.12 Diagram Algoritma Perhitungan Air Minum Layak

Terkait dengan kondisi data, terdapat definisi baru tentang perhitungan air minum layak dari Bappenas, yang kemudian diadopsi oleh BPS, khususnya untuk tahun 2020, yang umumnya menghasilkan nilai yang lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2019. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan kembali indikator yang tepat untuk mengukur kelayakan air minum di suatu daerah, misalkan dengan menggunakan indikator dari Kementerian PUPR terkait dengan Pengelolaan Air Minum.

ii). Kategori Akses Sanitasi Layak

Sama seperti kondisi sumber air minum layak, kondisi akses sanitasi layak secara umum juga meningkat, namun terdapat juga daerah yang justru mengalami penurunan, khususnya di Kabupaten dan Kota. Untuk daerah penerima DID tahun 2021, tidak ada satupun daerah yang mengalami penurunan. Dengan melihat kondisi variasi dan perkembangan data, kategori ini juga tetap layak dipertahankan dalam penghitungan DID tahun 2022.

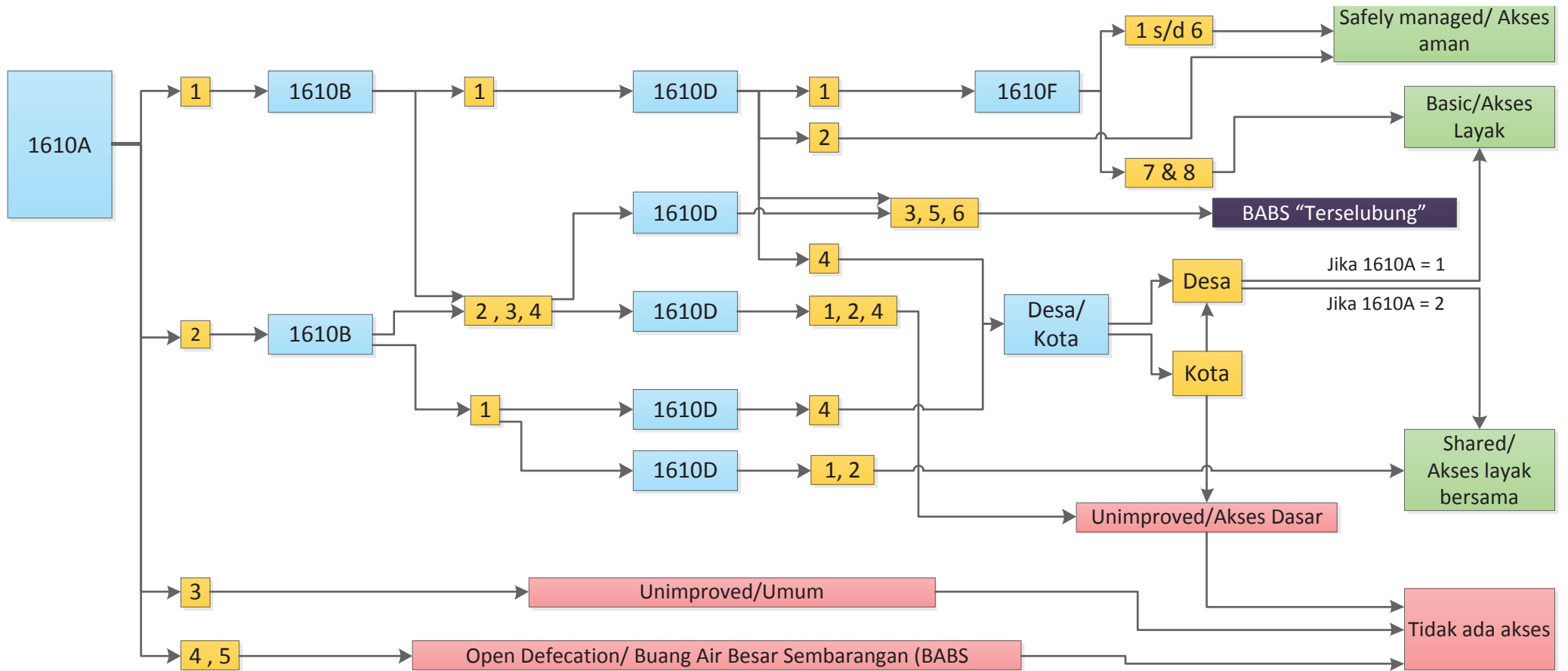
Tabel 1.28 Statistik Deskriptif Akses Sanitasi Layak untuk DID Tahun 2021 (Persen)

Daerah	Semua Daerah			Daerah Penerima DID			
	Kabupaten	2018	2019	Delta	2018	2019	Delta
Maksimum		97.81	100.00	58.99	85.09	94.07	58.99
Minimum		0.00	1.37	-13.74	18.53	75.95	8.77
Rata-rata		59.16	70.43	11.27	60.72	84.75	24.03
St. Deviasi		21.89	19.29	11.69	17.62	5.35	13.67
Koefisien Variasi		0.37	0.27	1.04	0.29	0.06	0.57

Kota	2018	2019	Delta	2018	2019	Delta
	Maksimum	99.21	99.68	22.15	97.90	99.68
Minimum	32.10	37.00	-10.58	80.16	92.63	1.78
Rata-rata	83.04	85.80	2.76	89.56	95.96	6.40
St. Deviasi	14.66	13.47	5.31	5.12	2.15	3.50
Koefisien Variasi	0.18	0.16	1.93	0.06	0.02	0.55

Provinsi	2018	2019	Delta	2018	2019	Delta
	Maksimum	91.14	94.67	31.60	79.19	89.27
Minimum	33.75	38.27	0.95	52.48	79.22	10.08
Rata-rata	68.35	77.34	8.99	67.44	83.17	15.73
St. Deviasi	12.94	10.53	6.48	13.64	5.36	9.55
Koefisien Variasi	0.19	0.14	0.72	0.20	0.06	0.61

Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan, Diolah, 2021



Gambar 1.13 Diagram Algoritma Perhitungan Sanitasi Layak

Tabel 1.29 Keterangan Terkait Algoritma Perhitungan Sanitasi Layak

Kode	1610A	16108	16100	1610F
Definisi	Fasilitas tempat buang air besar dan siapa penggunanya.	Apakah jenis jamban/kloset yang digunakan rumah tangga	Dimanakah tempat pembuangan akhir tinja	Dalam 5 tahun terakhir, berapa kali tangka septic inidikosongkan/ dilakukan penyedotan
Kriteria	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada, digunakan hanya ART sendiri 2. Ada, digunakan bersama ART rumah tangga tertentu 3. Ada, di MCK umum/ siapapun menggunakan 4. Ada, ART tidak menggunakan 5. Tidak ada fasilitas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Leher Angsa 2. Plengsengan denga tutup 3. Plengsengan tanpa tutup 4. Cempung/Cubluk 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tangki septic 2. IPAL 3. Kolam/sawah/ sungai/danau/ laut 4. Lubang Tanah 5. Pantai/tanah lapang/kebun 6. Lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 1-6 kali atau lebih ➤ Tidak Pernah ➤ Tidak Tahu

Untuk kelompok kategori pelayanan dasar publik bidang infrastruktur ke depan, terkait dengan RPJMN Tahun 2020-2024, sebaiknya diarahkan sesuai dengan indikator pembangunan berkelanjutan (SDGs). Untuk kategori pelayanan dasar publik bidang infrastruktur dalam DID tahun 2022, selain kedua indikator di atas, perlu ditambahkan dengan Kategori Rumah Layak Huni, dimana perumahan dan permukiman juga merupakan salah satu jenis Standar Pelayanan Minimum (SPM), yang merupakan kewajiban Pemerintah Daerah. Data indikator rumah layak huni berasal dari BPS, yang juga bersumber dari hasil survei Susenas yang dilaksanakan setiap tahun. Rumah layak huni merupakan rumah yang memenuhi semua kriteria ketahanan bangunan, luas lantai per kapita, akses air minum layak dan akses sanitasi layak.

5. Kelompok Kategori Kesejahteraan Masyarakat

i). Kategori Persentase Penduduk Miskin

Secara umum, rata-rata persentase penduduk miskin mengalami penurunan, namun terdapat juga daerah yang justru mengalami peningkatan. Untuk daerah penerima DID tahun 2020/21 tidak ada satupun daerah yang mengalami peningkatan.. Dengan melihat kondisi variasi dan perkembangan data persentase penduduk miskin, kategori ini juga tetap layak dipertahankan dalam penghitungan DID tahun 2022.

Tabel 1.30 Statistik Deskriptif Persentase Penduduk Miskin untuk DID Tahun 2021 (Persen)

Daerah	Semua Daerah			Daerah Penerima DID		
Kabupaten	2018	2019	Delta	2018	2019	Delta
Maksimum	43.49	43.65	0.89	12.02	10.98	-0.36
Minimum	1.98	1.78	-1.78	3.05	2.67	-1.32
Rata-rata	13.59	13.20	-0.40	7.42	6.78	-0.64
St. Deviasi	8.01	7.94	0.37	2.16	2.00	0.22
Koefisien Variasi	0.59	0.60	-0.93	0.29	0.29	-0.34

Kota	2018	2019	Delta	2018	2019	Delta
Maksimum	23.42	22.68	0.25	4.95	4.51	-0.22
Minimum	1.68	1.68	-2.21	2.39	2.17	-0.70
Rata-rata	7.21	6.96	-0.25	3.85	3.48	-0.37
St. Deviasi	4.07	3.92	0.31	1.07	0.94	0.17
Koefisien Variasi	0.56	0.56	-1.22	0.28	0.27	-0.45

Provinsi	2018	2019	Delta	2018	2019	Delta
Maksimum	27.74	27.53	0.13	7.45	6.91	-0.46
Minimum	3.57	3.47	-1.29	5.25	4.62	-0.63
Rata-rata	10.81	10.46	-0.35	6.60	6.05	-0.54
St. Deviasi	5.78	5.68	0.26	1.18	1.25	0.09
Koefisien Variasi	0.53	0.54	-0.75	0.18	0.21	-0.16

Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan, Diolah, 2021

ii). Kategori Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Kondisi IPM secara umum meningkat dengan stabil, tidak terlalu bervariasi, dan tidak ada yang menurun dari tahun 2018 ke 2019. Memang, terdapat beberapa daerah yang masih sangat rendah nilai IPM-nya. Secara umum, rata-rata IPM seluruh daerah masih dalam kategori sedang. Untuk daerah penerima DID pada tahun 2021 rata-ratanya merupakan IPM dalam kategori tinggi karena sudah di atas 70, kecuali untuk Kabupaten. Dengan melihat kondisi variasi dan perkembangan data IPM tersebut, kategori ini juga tetap layak dipertahankan dalam penghitungan DID tahun 2022.

Tabel 1.31 Statistik Deskriptif IPM untuk DID Tahun 2021

Daerah	Semua Daerah			Daerah Penerima DID		
Kabupaten	2018	2019	Delta	2018	2019	Delta
Maksimum	83.42	83.85	1.33	80.87	81.59	0.99
Minimum	29.42	30.75	0.26	67.43	68.37	0.65
Rata-rata	66.92	67.59	0.67	71.34	72.18	0.85
St. Deviasi	5.52	5.45	0.19	2.65	2.61	0.09
Koefisien Variasi	0.08	0.08	0.28	0.04	0.04	0.10

Kota	2018	2019	Delta	2018	2019	Delta
Maksimum	86.11	86.65	0.98	84.37	85.07	0.98
Minimum	63.48	64.46	0.23	77.41	78.26	0.64
Rata-rata	76.86	77.47	0.60	80.29	81.08	0.78
St. Deviasi	4.07	4.00	0.17	2.53	2.44	0.12
Koefisien Variasi	0.05	0.05	0.29	0.03	0.03	0.15

Provinsi	2018	2019	Delta	2018	2019	Delta
Maksimum	80.47	80.76	0.96	75.83	76.61	0.79
Minimum	60.06	60.84	0.29	71.30	72.03	0.64
Rata-rata	70.39	71.04	0.65	73.54	74.28	0.73
St. Deviasi	3.99	3.91	0.14	2.14	2.13	0.07
Koefisien Variasi	0.06	0.06	0.21	0.03	0.03	0.09

Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan, Diolah, 2021

iii). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Seperti yang telah disarankan sebelumnya, untuk kelompok kategori Kesejahteraan Masyarakat, sesuai dengan prioritas dalam RPJMN Tahun 2020-2024, selain kategori persentase penduduk miskin dan IPM, juga telah memasukkan kategori persentase atau tingkat pengangguran terbuka (TPT) dalam alokasi DID tahun 2021. Data untuk kategori tersebut tersedia di BPS untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang diperoleh melalui Statistik Tenaga Kerja Nasional (Sakernas) setiap tahunnya. Dengan melihat variasi dan perkembangan data, serta baru masuknya indikator TPT dalam DID Tahun 2021, maka indikator TPT sebaiknya juga tetap menjadi indikator dalam DID Tahun 2022.

Tabel 1.32 Statistik Deskriptif TPT untuk DID Tahun 2021

Daerah	Semua Daerah			Daerah Penerima DID		
Kabupaten	2018	2019	Delta	2018	2019	Delta
Maksimum	12.77	11.08	3.48	6.00	3.34	-0.01
Minimum	0.17	0.00	-3.43	0.34	0.33	-3.10
Rata-rata	3.96	3.94	-0.01	2.70	2.01	-0.69
St. Deviasi	2.08	1.98	0.87	1.31	0.86	0.58
Koefisien Variasi	0.53	0.50	-86.32	0.49	0.43	-0.85

Kota	2018	2019	Delta	2018	2019	Delta
Maksimum	12.52	12.37	2.15	6.72	5.51	-0.45
Minimum	1.82	2.22	-2.23	3.03	2.45	-1.42
Rata-rata	6.88	6.64	-0.23	5.16	4.26	-0.89
St. Deviasi	2.41	2.19	0.80	1.16	0.97	0.32
Koefisien Variasi	0.35	0.33	-3.44	0.23	0.23	-0.36

Provinsi	2018	2019	Delta	2018	2019	Delta
Maksimum	8.52	8.11	0.45	5.22	4.40	-0.21
Minimum	1.37	1.52	-0.82	3.35	3.14	-0.82
Rata-rata	4.86	4.77	-0.09	3.93	3.53	-0.40
St. Deviasi	1.64	1.51	0.28	0.87	0.60	0.28
Koefisien Variasi	0.34	0.32	-3.16	0.22	0.17	-0.70

Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan, Diolah, 2021

6. Kelompok Kategori Pelayanan Umum Pemerintahan

i). Kategori Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Untuk DID tahun 2021, terdapat reformulasi dalam kategori penyelenggaraan pemerintahan, yang sebelumnya didasarkan atas skor yang terbaik dari nilai hasil Evaluasi LPPD dari Kementerian Dalam Negeri, sejak DID tahun 2021 formulanya menggunakan kombinasi nilai tahun terakhir dan delta dari tahun sebelumnya ke tahun berikutnya. Dengan melihat kondisi variasi dan perkembangan data terkait dengan hasil evaluasi LPPD, sebaiknya indikator ini juga tetap dipertahankan dalam alokasi DID tahun 2022.

Tabel 1.33 Statistik Deskriptif LPPD untuk DID Tahun 2021

Daerah	Semua Daerah			Daerah Penerima DID			
	Kabupaten	2018	2019	Delta	2018	2019	Delta
Maksimum		3.41	3.56	1.66	3.34	3.56	1.66
Minimum		1.64	3.00	-0.18	1.75	3.22	0.20
Rata-rata		2.97	3.22	0.25	2.98	3.40	0.42
St. Deviasi		0.28	0.15	0.25	0.30	0.09	0.26
Koefisien Variasi		0.09	0.05	1.00	0.10	0.03	0.61

Kota	2018	2019	Delta	2018	2019	Delta
Maksimum	3.44	3.54	0.76	3.33	3.54	0.76
Minimum	2.61	3.00	-0.02	2.63	3.35	0.21
Rata-rata	3.07	3.28	0.21	3.00	3.42	0.43
St. Deviasi	0.20	0.14	0.16	0.23	0.06	0.18
Koefisien Variasi	0.06	0.04	0.76	0.08	0.02	0.43

Provinsi	2018	2019	Delta	2018	2019	Delta
Maksimum	3.30	3.41	0.23	2.99	3.22	0.23
Minimum	2.83	3.02	-0.14	2.99	3.22	0.23
Rata-rata	3.05	3.15	0.10	2.99	3.22	0.23
St. Deviasi	0.16	0.13	0.10			
Koefisien Variasi	0.05	0.04	1.07			

Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan, 2020

ii). Kategori Perencanaan Pembangunan Daerah

Setiap tahun dalam DID tahun 2019, 2020, dan 2021 terdapat 8 pemerintah daerah yang mendapatkan penghargaan kategori perencanaan pembangunan daerah (PPD), yaitu 3 untuk kabupaten, 3 untuk kota dan 2 untuk provinsi. Dari data penerima DID di ketiga tahun tersebut, hanya terdapat sedikit yang mendapatkan alokasi DID di beberapa tahun tersebut. Dengan melihat petunjuk penilaian pada lomba PPD yang dilakukan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan juga data penerima DID di tahun 2019, 2020 dan 2021, kategori PPD ini tetap layak dipertahankan dalam alokasi DID tahun 2022.

iii). Kategori Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Untuk DID tahun 2021, terdapat juga reformulasi dalam kategori SAKIP, yang sebelumnya didasarkan atas skor yaitu memiliki nilai SAKIP 70 ke atas atau nilai B, sejak DID tahun 2021 formulanya menggunakan kombinasi nilai tahun terakhir dan delta dari tahun sebelumnya ke tahun berikutnya. Dengan melihat kondisi variasi dan perkembangan data terkait dengan penilaian untuk kategori SAKIP tersebut, sebaiknya indikator ini juga tetap dipertahankan dalam alokasi DID tahun 2022.

Tabel 1.34 Statistik Deskriptif SAKIP untuk DID tahun 2021

Daerah	Semua Daerah			Daerah Penerima DID			
	Kabupaten	2018	2019	Delta	2018	2019	Delta
Maksimum		82.17	83.10	35.58	74.54	81.50	15.17
Minimum		0.00	0.00	-4.02	46.84	60.09	1.65
Rata-rata		54.43	57.34	2.91	63.56	68.62	5.05
St. Deviasi		13.61	12.47	4.59	6.56	5.34	3.09
Koefisien Variasi		0.25	0.22	1.58	0.10	0.08	0.61

Kota	2018	2019	Delta	2018	2019	Delta
	Maksimum	80.05	80.03	7.52	75.01	80.03
Minimum	30.29	30.56	-2.05	63.08	66.28	1.24
Rata-rata	61.38	62.91	1.54	68.23	71.32	3.08
St. Deviasi	8.86	8.83	1.56	4.28	4.38	1.21
Koefisien Variasi	0.14	0.14	1.02	0.06	0.06	0.39

Provinsi	2018	2019	Delta	2018	2019	Delta
Maksimum	90.10	90.19	7.51	80.18	81.56	7.51
Minimum	56.12	59.34	-1.87	62.53	70.04	1.38
Rata-rata	67.76	69.64	1.88	70.59	74.29	3.70
St. Deviasi	8.41	7.71	2.07	7.58	5.42	2.65
Koefisien Variasi	0.12	0.11	1.11	0.11	0.07	0.72

Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan, 2021

iv). Kategori Inovasi Pelayanan Publik

Untuk kategori inovasi pelayanan publik, penilaiannya dilakukan oleh Kemenpan-RB melalui lomba inovasi pelayanan publik, dimana penerima DID untuk kategori ini adalah yang masuk Top 45 dan memenuhi kriteria utama. Dengan melihat proses dan sistem penilaiannya yang dilakukan rutin setiap tahun serta daftar daerah penerima DID untuk kategori ini yang tidak memiliki korelasi tinggi antara tahun 2020 dan 2021, kategori inovasi pelayanan publik tetap dapat dipertahankan untuk alokasi DID tahun 2022. Seiring berjalannya waktu, karena terdapat banyak kategori inovasi pelayanan public yang dilakukan oleh Kemenpan-RB, maka perlu dipertimbangkan untuk melakukan penilaian atas kategori ini dengan didasarkan atas formula, tidak sekedar hanya masuk dalam Top 45.

v). Kategori Inovasi Pemerintahan Daerah

Kategori inovasi pemerintahan daerah merupakan kategori yang baru pertama kali digunakan dalam DID tahun 2020. Penilaian kategori inovasi pemerintahan daerah dilakukan melalui Indeks Inovasi Daerah, dimana untuk DID tahun 2021 menggunakan Indeks Inovasi Daerah tahun 2019. Dari informasi media, Indeks Inovasi Daerah tahun 2020 sudah tersedia di Badan Litbang Kemendagri, dan beberapa daerah sudah mengetahui informasinya.

Secara konsep, kategori inovasi pemerintahan daerah dapat dipertahankan dalam alokasi DID tahun 2022, Namun, bila melihat nama-nama daerahnya untuk penerima DID tahun 2020 dan daerah calon penerima DID tahun 2021, nama-nama daerah tersebut hampir sama. Terkait dengan hal tersebut, untuk alokasi DID tahun 2022, perlu dilihat kembali kemungkinannya reformulasinya agar daerah penerimanya sebagian besar tidak sama seperti tahun sebelumnya. Perubahan formulasi tersebut dapat dilakukan misalnya dengan metode kombinasi capaian nilai terakhir dan delta-nya, agar dapat mencerminkan kinerja daerah yang sesungguhnya.

7. Kelompok Kategori Pengelolaan Sampah

Penilaian kategori pengelolaan sampah untuk DID dilakukan melalui kerangka penilaian berupa: (i) peraturan pengurangan dan penanganan sampah plastik dengan indikator berupa ketersediaan peraturan daerah tentang Pengelolaan Sampah, ketersediaan peraturan bupati/walikota tentang Jakstrada Pengelolaan Sampah, ketersediaan peraturan tentang pembatasan sampah plastik, dan penerapan peraturan bupati/walikota tentang pembatasan sampah plastik; dan (ii) pengurangan dan penanganan sampah melalui implementasi jakstrada pengelolaan sampah (penerapan kebijakan dan program pengurangan dan penanganan sampah anorganik), dengan indikator berupa ketersediaan bank sampah unit, ketersediaan bank sampah induk, persentase Jumlah Sampah yang dikelola di Bank Sampah Induk, dan ketersediaan TPS 3R.

Untuk DID tahun 2022, apabila memang nantinya dapat tersedia data dasar yang jelas dan objektif untuk menentukan daerah penerima alokasi DID untuk kategori pengelolaan sampah, sebaiknya kategori pengelolaan sampah tetap dapat dipertahankan. Namun, apabila tidak tersedia data dasar sebagaimana dimaksudkan, maka kategori pengelolaan sampah sebaiknya dihilangkan. Sebagai gantinya, antara lain adalah berupa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Daerah yang datanya relatif tersedia. Tentunya hal tersebut perlu dikomunikasikan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai kementerian teknis yang terkait.

8. Kelompok Kategori Peningkatan Investasi

Kondisi investasi secara umum meningkat, namun terdapat juga daerah yang mengalami penurunan. Untuk daerah penerima DID tahun 2021, terdapat beberapa daerah yang mengalami penurunan. Bila dilihat dari data yang digunakan, data tersebut sama dengan yang digunakan dalam DID tahun 2020. Apabila untuk DID tahun 2022 terdapat data yang lebih update, maka kategori ini tetap layak dipertahankan dalam penghitungan DID tahun 2022. Namun, bila datanya tetap, maka sebaiknya kategori ini dihilangkan dan diganti dengan indikator lain, misalnya adalah Indikator Kinerja PTSP yang datanya ada dari Kementerian Investasi/BKPM.

Tabel 1.35 Statistik Deskriptif Peningkatan Investasi untuk DID Tahun 2021 (Nilai Ln)

Daerah Kabupaten	Semua Daerah			Daerah Penerima DID		
	2018	2019	Delta	2018	2019	Delta
Maksimum	31.67	31.46	27.97	30.38	30.83	27.97
Minimum	0.00	0.00	-25.31	0.00	26.40	-0.01
Rata-rata	22.99	23.60	0.61	26.02	28.49	2.46
St. Deviasi	8.61	7.69	5.95	5.25	1.08	4.76
Koefisien Variasi	0.37	0.33	9.73	0.20	0.04	1.93

Kota	2018	2019	Delta	2018	2019	Delta
Maksimum	30.33	30.37	25.47	30.06	30.37	6.24
Minimum	0.00	0.00	-25.49	21.19	26.82	0.31
Rata-rata	23.19	24.58	1.39	26.78	28.75	1.98
St. Deviasi	8.47	6.05	7.35	2.77	1.04	1.86
Koefisien Variasi	0.37	0.25	5.28	0.10	0.04	0.94

Provinsi	2018	2019	Delta	2018	2019	Delta
Maksimum	32.43	32.52	1.03	32.43	32.52	0.54
Minimum	27.75	27.34	-1.39	30.05	30.51	0.08
Rata-rata	30.09	30.10	0.01	30.97	31.32	0.35
St. Deviasi	1.13	1.23	0.50	0.88	0.71	0.21
Koefisien Variasi	0.04	0.04	37.44	0.03	0.02	0.58

Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan, Diolah, 2021

9. Kelompok Kategori Peningkatan Ekspor

Untuk DID tahun 2021, nilai dilihat dari datanya, masih menggunakan data untuk DID tahun 2020. Hal yang relatif sama dengan kondisi data untuk kategori peningkatan investasi, dimana apabila untuk DID tahun 2022 terdapat data yang lebih update, maka kategori ini tetap layak dipertahankan dalam penghitungan DID tahun 2022. Namun, bila datanya tetap, maka sebaiknya kategori ini dihilangkan dan diganti dengan indikator lain.

Tabel 1.36 Statistik Deskriptif Peningkatan Ekspor untuk DID Tahun 2021 (Nilai Ln)

Daerah	Semua Daerah			Daerah Penerima DID		
Kabupaten	2018	2019	Delta	2018	2019	Delta
Maksimum	23.68	25.48	21.25	23.68	25.48	21.25
Minimum	0.00	0.00	-19.77	0.00	16.58	0.60
Rata-rata	12.69	14.01	1.27	16.86	21.03	4.17
St. Deviasi	7.79	7.34	5.46	6.88	2.02	5.81
Koefisien Variasi	0.61	0.52	4.31	0.41	0.10	1.39






Kota	2018	2019	Delta	2018	2019	Delta
Maksimum	25.73	23.69	20.45	21.74	23.69	20.45
Minimum	0.00	0.00	-19.87	0.00	18.82	0.98
Rata-rata	15.69	17.01	1.32	17.47	21.52	4.04
St. Deviasi	6.07	5.28	5.16	6.85	1.47	6.14
Koefisien Variasi	0.39	0.31	3.92	0.39	0.07	1.52

Provinsi	2018	2019	Delta	2018	2019	Delta
Maksimum	23.77	22.20	1.35	23.77	22.20	1.35
Minimum	0.00	0.00	-20.34	16.84	13.01	-5.77
Rata-rata	14.34	5.15	-9.23	19.90	17.66	-2.25
St. Deviasi	7.26	7.80	7.75	2.39	3.53	2.49
Koefisien Variasi	0.51	1.52	-0.84	0.12	0.20	-1.11

Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan, Diolah, 2021

10. Kategori Pengendalian Inflasi

Kategori pengendalian inflasi merupakan kategori baru untuk DID tahun 2021, yang merupakan tindak lanjut dari TPID Award dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Bilai dilihat dari penilaian dan kriterianya, serta relatif barunya indikator untuk kategori ini, maka kategori pengendalian inflasi sebaiknya dipertahankan dalam DID Tahun 2022.

TPID Provinsi dan Kab/Kota IHK		TPID Kab/kota Non-IHK	
Aspek Pengukuran	Kriteria Pengukuran Kinerja	Aspek Pengukuran	Kriteria Pengukuran Kinerja
PROSES 20%  <p>Mencerminkan langkah-langkah yang ditempuh dalam koordinasi pengendalian inflasi daerah</p>	1. Koordinasi 5% 2. Rekomendasi kebijakan 10% 3. Akuntabilitas 5%	PROSES 40%  <p>Mencerminkan langkah-langkah yang ditempuh dalam koordinasi pengendalian inflasi daerah</p>	1. Koordinasi 10% 2. Rekomendasi kebijakan 20% 3. Akuntabilitas 10%
OUTPUT 30%  <p>Mencerminkan program unggulan daerah dalam mendukung pengendalian inflasi</p>	4. Inovasi program <ul style="list-style-type: none"> - Pemilihan program - Kerjasama dg stakeholder - Pembiayaan program - Implementasi program - Pemanfaatan teknologi <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 5px;"> + <div style="margin-left: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> - Konteks Penanganan covid (daya beli) - Arahan rakornas </div> </div>	OUTPUT 60%  <p>Mencerminkan program unggulan daerah dalam mendukung pengendalian inflasi</p>	4. Inovasi program <ul style="list-style-type: none"> - Pemilihan program - Kerjasama dg stakeholder - Pembiayaan program - Implementasi program - Pemanfaatan teknologi <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 5px;"> + <div style="margin-left: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> - Konteks Penanganan covid (daya beli) - Arahan rakornas </div> </div>
OUTCOME 50%  <p>Mencerminkan hasil dari upaya daerah dalam melakukan koordinasi pengendalian inflasi</p>	5. Realisasi inflasi 40% <ul style="list-style-type: none"> 5.1 Dibanding Rerata 3 Tahun 5.2 Dibanding Sasaran Nasional 6. Volatilitas Inflasi 10%		

Gambar 1.14 Perbedaan Pengukuran Kinerja TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota

11. Kategori Pencegahan Korupsi

Untuk DID tahun 2021, kategori pencegahan korupsi juga mengalami reformulasi, dimana untuk DID tahun 2021, didasarkan atas kombinasi nilai akhir dari Indeks Pencegahan Korupsi (IPK) dan deltanya. Bilai dilihat dari variasi dan perkembangan datanya, kategori pencegahan korupsi layak dipertahankan untuk masuk dalam kategori DID tahun 2022.

Tabel 1.37 Statistik Deskriptif Indeks Pencegahan Korupsi untuk DID Tahun 2021 (Rp. Miliar)

Daerah	Semua Daerah			Daerah Penerima DID		
Kabupaten	2018	2019	Delta	2018	2019	Delta
Maksimum	0.93	0.97	0.23	0.83	0.95	0.21
Minimum	0.64	0.72	-0.13	0.64	0.87	0.00
Rata-rata	0.77	0.84	0.07	0.74	0.90	0.02
St. Deviasi	0.06	0.06	0.08	0.05	0.03	0.05
Koefisien Variasi	0.08	0.07	1.10	0.07	0.03	2.71

Kota	2018	2019	Delta	2018	2019	Delta
Maksimum	0.93	0.94	0.21	0.73	0.87	0.18
Minimum	0.65	0.75	-0.06	0.73	0.87	0.18
Rata-rata	0.77	0.87	0.09	0.73	0.87	0.18
St. Deviasi	0.08	0.04	0.08			
Koefisien Variasi	0.10	0.05	0.86			

Provinsi	2018	2019	Delta	2018	2019	Delta
Maksimum	0.92	0.96	0.21	0.00	0.00	0.00
Minimum	0.67	0.76	-0.10	0.00	0.00	0.00
Rata-rata	0.79	0.88	0.09			
St. Deviasi	0.07	0.05	0.08			
Koefisien Variasi	0.09	0.06	0.93			

Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan, Diolah, 2021



SARAN/REKOMENDASI

Kajian tentang *review* penganggaran dan pengalokasian DID tahun 2021 dan usulan perbaikannya untuk DID tahun 2022 ini disusun untuk mengetahui perkembangan dan dinamika kebijakan DID dari waktu ke waktu khususnya DID tahun 2021 ke 2022, sehingga dapat terdokumentasikan dengan baik terkait dengan latar belakang, alasan, tujuan dan proses dari dilakukannya perbaikan dan penyempurnaan kebijakan penganggaran dan pengalokasian DID ke depan, baik terkait dengan indikasi kebutuhan dana TKDD untuk DID, indikator kriteria utama, indikator kriteria kinerja, dan berbagai hal lainnya yang terkait.

Dari uraian yang telah disampaikan sebelumnya, beberapa saran/rekomendasi kebijakan terkait penganggaran dan pengalokasian DID untuk tahun 2022 antara lain:

- a. Indikasi kebutuhan dana TKDD untuk DID pada tahun 2022 sebaiknya tidak menurun, minimal dapat dipertahankan dan bahkan sebaiknya dapat ditingkatkan dari tahun sebelumnya (tahun 2021). Dari hasil proyeksi, dana TKDD untuk DID pada tahun 2021 dapat ditingkatkan menjadi minimal menjadi Rp. 16,4 triliun (meningkat minimal 21,34 persen dari tahun 2021). Hal tersebut tentunya dengan asumsi bahwa wabah pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia telah mulai mereda dan kondisi keuangan negara sudah membaik dan stabil;
- b. Kriteria utama yang perlu dipertahankan adalah: (i) Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); (ii) Penetapan Peraturan Daerah mengenai APBD tepat waktu; dan (iii) Pelaksanaan e-government (*e-procurement* dan *e-budgeting*). Indikator ketersediaan PTSP sebaiknya dihilangkan saja;

- c. Dalam penetapan dan penghitungan alokasi DID, sebaiknya tetap menggunakan kluster seperti DID tahun-tahun sebelumnya (khususnya DID untuk tahun 2021), yaitu tetap menurut jenis pemerintahan daerahnya yang berjumlah 3 kluster, yakni provinsi, kabupaten, dan kota.
- d. Dari semua kelompok kategori, koefisien korelasi daerah penerima DID antara tahun 2020 dan 2021 cukup rendah (baik). Terdapat satu kategori yang juga perlu mendapatkan perhatian karena memiliki koefisien korelasi yang agak tinggi (lebih besar dari 0,5), yaitu untuk kategori Inovasi Daerah. Koefisien korelasi yang agak tinggi tersebut menunjukkan bahwa daerah yang telah mendapatkan alokasi pada kinerja tersebut pada tahun 2020, memiliki peluang yang besar untuk mendapatkan alokasi kembali pada kategori yang bersangkutan pada tahun 2021.
- e. Data yang relatif kurang *up to date* dalam penghitungan DID umumnya adalah data-data yang terkait kategori kinerja pelayanan dasar publik dan kategori kesejahteraan masyarakat yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Mengingat sumber data yang dilakukan melalui Susenas (yang dilakukan 2 kali dalam setahun, yaitu Bulan Maret dan September), dan juga waktu penetapan dan penghitungan alokasi DID yang baru diumumkan paling cepat akhir Oktober pada tahun yang bersangkutan, sebenarnya terdapat potensi untuk menggunakan data yang lebih *up to date*. Tentunya hal ini perlu dikomunikasikan dengan BPS sebagai penyedia data terkait kategori kinerja pelayanan dasar publik dan kategori kinerja kesejahteraan masyarakat;
- f. Terkait dengan indikator-indikator kinerja yang penilaiannya menggunakan kombinasi capaian tahun terakhir dan nilai perubahannya (delta) dari tahun sebelumnya, sebaiknya ke depan nilai perubahannya (delta) mendapatkan bobot yang lebih tinggi dibandingkan dengan bobot pencapaian nilai terakhir;
- g. Indikator dan target kegiatan prioritas dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dapat dijadikan sebagai dasar dalam penambahan, pengurangan atau perbaikan terhadap indikator dalam berbagai kategori kinerja yang digunakan dalam penghitungan alokasi DID ke depan; dan
- h. Untuk kategori kinerja dalam DID tahun 2022, usulan perubahan indikator kinerjanya antara lain:
 - ☑ Kemandirian keuangan daerah sebaiknya menggunakan indikator rasio Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PDRB Non Migas (hanya Lapangan Usaha yang Sekunder dan Tersier saja, tidak termasuk yang primer)
 - ☑ Menghilangkan indikator efektifitas pengelolaan belanja daerah yaitu terkait belanja modal Pendidikan dan belanja Kesehatan non kantor terhadap realisasi belanja masing-masing bidang, karena relatif tidak mencerminkan kualitas pengelolaan belanja daerah;

- ✍ Menghilangkan indikator penanganan *stunting* balita bila datanya tidak tersedia dan kurang valid dan akurat;
- ✍ Menghilangkan indikator peningkatan investasi dan ekspor bila datanya tidak tersedia cukup update;
- ✍ Mengganti indikator Pengelolaan Sampah bila datanya tidak tersedia cukup update, yaitu dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dari KLHK; dan
- ✍ Pada kelompok kategori pelayanan dasar publik bidang infrastruktur, sebaiknya ditambahkan dengan kategori proporsi rumah tangga yang menempati hunian layak (rumah layak huni);
- ✍ Perlunya penambahan indikator Kinerja Pelayanan PTSP yang dilakukan penilaiannya oleh Kementerian Investasi/BKPM, dan menggantikan indikator peningkatan investasi yang datanya relatif kurang *up-to-date*.

Demikianlah beberapa saran/rekomendasi yang dapat diberikan dari penyusunan kajian ini. Semoga kajian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya para pengambil kebijakan terkait dengan penganggaran dan pengalokasian DID tahun 2022 ke depan.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah serta Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian Negara/Lembaga

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah

Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021



ISBN 978-623-6080-43-6 (PDF)



9 786236 080436